



**PENGARUH KOMITMEN, SUMBER DAYA MANUSIA, DAN
PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN TERHADAP PENYUSUNAN
APBNag
(Studi Kasus Pada Nagari Sungai Tarab, Nagari Padang Laweh,
Dan Nagari Pasie Laweh)**

**THE INFLUENCE OF COMMITMENT, HUMAN RESOURCES, AND
PRESENTATION OF FINANCIAL STATEMENTS ON THE
PREPARATION OF THE STATE BUDGET
(Case Study on Nagari Sungai Tarab, Nagari Padang Laweh, and Nagari
Pasie Laweh)**

الدولة ميزانية إعداد على المال الية الية بيانات وعرض الية بشرية والموارد الية التزام تأثر ير
(لاوي به باسي ون اجاري لاوه به بادانج ون اجاري تاراب سوند غاي نا اجاري عن حالة دراسة)

SKRIPSI

*Ditulis Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S-1)
Pada Program Studi Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam*

OLEH :

**TEDI AMRIA
2030403098**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UIN MAHMUD YUNUS
BATUSANGKAR
2025 M / 1446 H**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Tedi Amria
Nim : 203043098
Program Studi : Akuntansi Syariah
Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa SKRIPSI yang berjudul **“Pengaruh Komitmen, Sumber Daya Manusia, dan Penyajian Laporan Keuangan Terhadap Penyusunan APBNag (Studi Kasus Pada Nagari Sungai Tarab, Nagari Padang Laweh, dan Nagari Pasie Laweh)”** adalah hasil karya sendiri bukan plagiat. Apabila dikemudian hari terbukti sebagai plagiat, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Batusangkar, 30 Januari 2025

Saya yang Menyatakan,



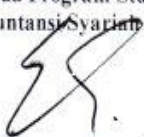
Tedi Amria
NIM. 2030403098

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing Skripsi atas nama Tedi Amria, NIM 2030403098 dengan judul **"PENGARUH KOMITMEN, SUMBER DAYA MANUSIA, DAN PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN TERHADAP PENYUSUNAN APBNag (Studi Kasus Pada Nagari Sungai Tarab, Nagari Padang Laweh, Dan Nagari Pasie Laweh)"** Memandang bahwa skripsi yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk dilanjutkan ke sidang *Munqasah*.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ketua Program Studi
Akuntansi Syariah


Elsa Fitri Amran, M.Si
NIP. 19870620 201903 2 009

Batusangkar, 17 Januari 2025
Pembimbing


Sri Adella Fitri, SE., M.Si
NIP. 19830713 200604 0 002

Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar




Dr. H. Rizal, M.Ag., CRP
NIP. 19731007 2002121 001

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi atas nama Tedi Amria, NIM: 2030403098, judul: "Pengaruh Komitmen, Sumber Daya Manusia, Dan Penyajian Laporan Keuangan Terhadap Penyusunan APBNag (Studi Kasus Pada Nagari Sungai Tarab, Nagari Padang Laweh, Dan Nagari Pasie Laweh)", telah diuji dalam ujian Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar pada 03 Februari 2025 dan dinyatakan telah lulus dan dapat diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dalam Program Studi Perbankan Syariah.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

No	Nama/NIP Penguji	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
1.	Sri Adella Fitri, SE., M.Si NIP: 19830713 200604 2 002	Ketua Sidang /Pembimbing		13/2-2025
2.	Elsa Fitri Amran, M.Si NIP: 19870620 201903 2 009	Penguji I/ Anggota		11/2-2025
3.	Atika Amor, S.E., M.Si NIP : 1992032 820201 2 014	Penguji II/ Anggota		11/2/2025

Batusangkar, Februari 2025

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus

Batusangkar



Dr. H. Rizal M. Ag., CRP
NIP. 197310072002121001

ABSTRAK

TEDI AMRIA NIM 2030403098 judul skripsi “**Pengaruh Komitmen, Sumber Daya Manusia, Dan Penyajian Laporan Keuangan Terhadap Penyusunan APBNag (Studi Kasus Nagari Sungai Tarab, Nagari Padang Laweh, Dan Nagari Pasie Laweh)**”. Program Studi Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Pengaruh Komitmen, Sumber Daya Manusia (SDM) , Dan Penyajian Laporan Keuangan Terhadap Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Nagari (APBNag). Studi kasus dilakukan di Nagari Sungai Tarab, Nagari Padang Laweh, Dan Nagari Pasie Laweh. Metode analisis regresi digunakan untuk mengukur dampak variabel independen terhadap variabel dependen.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa komitmen, sumber daya manusia, dan laporan keuangan secara signifikan mempengaruhi proses penyusunan APBNag di nagari-nagari yang menjadi objek studi. Temuan ini memberikan pemahaman lebih mendalam tentang faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan penyusunan APBNag di tingkat nagari. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pemahaman tentang pentingnya komitmen, sumber daya manusia, dan laporan keuangan dalam konteks penyusunan APBNag di tingkat nagari. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif yaitu dengan penyebaran kuesioner ke perangkat nagari. Aplikasi yang digunakan dalam mengolah data ialah SPSS 22. Jadi data yang didapatkan dari kuesioner yang telah diisi oleh responden bermanfaat sebagai user requirement untuk menjalankan penyusunan APBNag.

Kata Kunci : Komitmen, Sumber Daya Manusia, Penyajian Laporan Keuangan, Penyusunan APBNag

ABSTRACT

TEDI AMRIA NIM 2030403098 thesis title "*The Influence of Commitment, Human Resources, and Presentation of Financial Reports on the Preparation of the APBNag (Case Study of Nagari Sungai Tarab, Nagari Padang Laweh, and Nagari Pasie Laweh)*". Sharia Accounting Study Program, Faculty of Islamic Economics and Business, State Islamic University (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar.

This research aims to analyze the influence of commitment, human resources (HR), and presentation of financial reports on the preparation of the Nagari Revenue and Expenditure Budget (APBNag). Case studies were conducted in Nagari Sungai Tarab, Nagari Padang Laweh, and Nagari Pasie Laweh. The regression analysis method is used to measure the impact of the independent variable on the dependent variable.

The research results show that commitment, human resources and financial reports significantly influence the process of preparing the APBNag in the villages that are the object of study. These findings provide a deeper understanding of the factors that influence the success of APBNag preparation at the nagari level. It is hoped that the results of this research can contribute to an understanding of the importance of commitment, human resources and financial reports in the context of preparing the APBNag at the nagari level. The method used in this research is a quantitative method, namely by distributing questionnaires to nagari devices. The application used to process the data is SPSS 22. So the data obtained from the questionnaire that has been filled out by respondents is useful as a user requirement for carrying out the preparation of the APBNag.

Keywords: *Commitment, Human Resources, Presentation of Financial Reports, Preparation of the National Budget*

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

PERSETUJUAN PEMBIMBING

PENGESAHAN TIM PENGUJI

ABSTRAK i

ABSTRACT ii

DAFTAR ISI..... iii

DAFTAR TABEL v

DAFTAR GAMBAR..... vi

BAB I PENDAHULUAN..... 1

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Identifikasi Masalah 6

C. Pembatasan Masalah..... 6

D. Rumusan Masalah..... 6

E. Tujuan Penelitian 7

F. Manfaat Penelitian 8

G. Defenisi Operational..... 8

BAB II KAJIAN TEORI 10

A. Landasan Teori 10

1. Teori *Stewardship (Stewardship Theory)* 10

2. Desa (Nagari)..... 13

3. Komitmen Organisasi 15

4. Sumber Daya Manusia..... 21

5. Penyajian Laporan Keuangan 24

6. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Nagari (APBNag) 27

B. Kajian Terdahulu 31

C. Kerangka Teoritis 35

D. Hipotesis 36

BAB III METODE PENELITIAN 38

A. Jenis Penelitian 38

B. Tempat dan Waktu Penelitian.....	38
C. Populasi dan Sampel.....	39
D. Instrumen Penelitian	40
E. Sumber Data	44
F. Teknik Pengumpulan Data	44
G. Teknik Validasi Instrumen Penelitian	45
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	51
A. Gambaran Umum Nagari.....	51
1. Nagari Sungai Tarab	51
2. Nagari Padang Laweh.....	54
3. Nagari Pasie Laweh	59
B. Profil Responden	63
C. Hasil Penelitian.....	64
1. Uji Validitas	65
2. Uji Reliabilitas	67
3. Uji Asumsi Klasik.....	68
4. Analisis Regresi Linear Berganda	72
5. Koefisien determinasi (R ²).....	73
6. Uji T (T-Test).....	74
7. Uji F (F-Test)	75
D. Pembahasan Hasil Penelitian.....	76
BAB V PENUTUP.....	81
A. Kesimpulan.....	81
B. Saran	82
DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Waktu penelitian	39
Tabel 3. 2 Variabel Komitmen.....	40
Tabel 3. 3 Variabel Sumber Daya Manusia	41
Tabel 3. 4 Variabel Laporan Keuangan	42
Tabel 3. 5 Variabel Penyusunan APBNag.....	43
Tabel 4. 1 Data Sampel Penelitian	64
Tabel 4. 2 Uji validas Variabel Komitmen (X1).....	65
Tabel 4. 3 Uji validas Variable Sumber Daya Manusia (X2)	66
Tabel 4. 4 Uji Validitas Variabel Laporan Keuangan (X3)	66
Tabel 4. 5 Uji Validitas Variabel Penyusunan APBNag (Y)	67
Tabel 4. 6 Hasil Uji Reliabilitas	68
Tabel 4. 7 Hasil Uji Normalitas	69
Tabel 4. 8 Hasil Uji Multikolinearita	71
Tabel 4. 9 Hasil Uji Autokorelasi	72
Tabel 4. 10 Analisis Regresi Linear Berganda	73
Tabel 4. 11 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R ²).....	74
Tabel 4. 12 Hasil Uji t.....	74
Tabel 4. 13 Hasil Uji F.....	75

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Berfikir.....	36
Gambar 4. 1 Struktur Nagari Sungai Tarab	54
Gambar 4. 2 Struktur Nagari Padang Laweh	58
Gambar 4. 3 Struktur Nagari Pasie Laweh.....	63
Gambar 4. 4 Gambar Histogram	69
Gambar 4. 5 Uji P-Plot.....	70
Gambar 4. 6 Uji Heteroskedastisitas	71

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seiring dengan kemajuan zaman, Akuntansi Pemerintahan telah menjadi salah satu cabang ilmu akuntansi yang berkembang dengan sangat pesat. Penerapan akuntansi ini tidak hanya dilakukan oleh pemerintah pusat, tetapi juga mencakup tingkat daerah hingga wilayah perdesaan. Setiap tingkatan pemerintahan memerlukan pertanggungjawaban atas anggaran yang digunakan untuk berbagai kegiatan. Dalam perkembangannya, desa kini telah berubah menjadi entitas yang perlu diberdayakan agar mampu menjadi desa yang mandiri, maju, dan tangguh, guna mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Desa memiliki otoritas untuk mengelola wilayahnya secara mandiri berdasarkan kemampuan dan potensi masyarakat setempat, dengan tujuan mencapai kesejahteraan serta pemerataan ekonomi.

Dengan terus berkembangnya sistem Akuntansi Pemerintahan dan lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang mengatur tentang Pemerintahan Daerah sebagai bagian dari pemerintahan pusat, muncul pula Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang khusus membahas tentang Desa. Undang-Undang ini memberikan hak otonomi kepada desa untuk mengelola wilayahnya secara mandiri (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, 2014). Menurut Dewi (2020), pemerintah desa berperan langsung dalam mendukung pemerintah pusat, khususnya dalam melaksanakan pembangunan serta mengembangkan potensi masyarakat.

Desa memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi dalam hal pengelolaan keuangan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, pengelolaan keuangan desa diatur secara rinci untuk mendukung pelaksanaan otonomi desa. Aturan ini mencakup tahapan perencanaan anggaran, pelaporan, pertanggungjawaban, serta pengawasan. Dengan adanya alokasi dana desa, pengelolaan keuangan desa diharapkan menjadi lebih baik, mulai dari proses pencatatan hingga pelaporannya (Merlina, 2022).

Dalam Peraturan Daerah Sumatra Barat Pasal 1 Ayat 2 Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari atau desa, yang di wilayah ini dikenal dengan sebutan nagari, merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum adat yang memiliki latar belakang demografis dan historis. Nagari memiliki batas wilayah yang jelas, harta kekayaan sendiri, kewenangan untuk memilih pemimpin melalui musyawarah, serta kemampuan untuk mengatur dan mengelola kepentingan masyarakat berdasarkan filosofi adat "*Adat Basandi Syara'-Syara' Basandi Kitabullah*" atau sesuai dengan asal-usul dan tradisi setempat di wilayah Provinsi Sumatra Barat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, meskipun istilah desa atau nagari sering diasosiasikan dengan kemiskinan, tradisionalisme, dan kesederhanaan, sebenarnya desa memiliki keluhuran dan kearifan lokal yang luar biasa. Nagari merupakan pelopor sistem demokrasi yang sepenuhnya otonom dan berdaulat. Bahkan, sejak dahulu desa telah memiliki sistem pemerintahan, mekanisme, dan norma sosialnya sendiri.

Terkait dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, yang memberikan wewenang kepada desa untuk mengelola pemerintahannya secara mandiri, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2013 menyatakan bahwa nagari merupakan kesatuan masyarakat hukum yang sah. Nagari memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengelola kegiatan pemerintahan secara mandiri, berdasarkan prinsip penyelenggaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat setempat. Hal ini dilaksanakan berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, atau hak adat yang diakui dan dilindungi dalam sistem pemerintahan tersebut.

Pengelolaan keuangan mencerminkan kewenangan nagari untuk mengatur dan menjalankan pemerintahannya secara mandiri. Pengelolaan ini dilakukan sesuai dengan prinsip keterbukaan, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, serta disiplin dan ketertiban dalam keuangan. Administrasi keuangan nagari berlangsung dalam satu tahun anggaran, dimulai dari 1 Januari hingga 31 Desember. Keuangan nagari mencakup seluruh hak dan

kewajiban yang dapat dinilai secara finansial, termasuk barang dan jasa yang digunakan dalam pelaksanaan hak serta kewajiban tersebut. Pengelolaan keuangan nagari mencakup keseluruhan proses, mulai dari pengakuan, pelaksanaan, pencatatan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban. Pemerintah nagari bertanggung jawab penuh atas pengelolaan keuangan yang ada di wilayahnya.

Namun, secara umum, pedoman pengelolaan keuangan nagari, atau yang dikenal sebagai Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APBNag), mencakup asas-asas pengelolaan nagari, kewenangan, struktur, penyusunan rancangan APBNag, hingga pembinaan dalam mengelola dana nagari. Semua aspek ini diarahkan untuk memastikan pengelolaan keuangan nagari berjalan sesuai dengan prinsip yang tertib, transparan, dan partisipatif.

Penyusunan APBNag (Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari) merupakan keputusan kebijakan fiskal yang sangat berpengaruh dalam menentukan arah pembangunan nagari atau desa. APBNag tidak hanya berdampak pada pembangunan di tingkat nagari, tetapi juga mempengaruhi pembangunan di tingkat nasional. Dalam penyusunan APBNag, beberapa faktor dapat mempengaruhi prosesnya, seperti Komitmen, SDM (Sumber Daya Manusia), dan Penyajian Pelaporan Keuangan. Komitmen yang kuat dari pihak-pihak yang terlibat sangat penting untuk memastikan APBNag disusun secara akurat dan efektif. Selain itu, diperlukan SDM yang kompeten dan memahami proses penyusunan APBNag. Penyajian laporan keuangan yang efektif dan tepat waktu juga berperan penting dalam memudahkan dan memperlancar penyusunan APBNag.

Salah satu daerah yang menjadi fokus penelitian ini adalah Kabupaten Tanah Datar, yang meliputi tiga nagari di kawasan tersebut, yaitu Nagari Sungai Tarab, Nagari Padang Laweh, dan Nagari Pasie Laweh, yang terletak di Kecamatan Sungai Tarab. Nagari Sungai Tarab juga merupakan nama dari Kecamatan Sungai Tarab itu sendiri, sedangkan Nagari Pasie Laweh (Pasla) dan Nagari Padang Laweh dikenal karena keindahan alamnya yang terletak di kaki atau tebing Gunung Marapi. Nagari-nagari ini memiliki potensi besar

dalam hal sumber daya alam dan manusia, namun masih membutuhkan peningkatan dalam penyusunan APBNag yang akurat dan tepat waktu.

Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi pengelolaan keuangan nagari atau APBNag ialah komitmen dari petugas pelaksana pemerintah. Komitmen dalam suatu instansi pemerintah akan memberikan pengaruh yang baik bagi pengelolaan keuangan nagari sebab setiap pribadi memiliki nilai kepribadian yang berbeda. Dengan komitmen yang ada, pastinya akan menaikkan kualitas keuangan nagari sekaligus masyarakat bisa melihat bagaimana tingkat keseriusan pemerintah nagari dalam memberikan kinerja yang optimal bagi nagari yang dipimpinnya (Rulyanti et al., 2017).

Keharusan akan komitmen menjadi begitu penting, hingga beberapa organisasi menempatkan unsur ini sebagai salah satu syarat utama untuk menduduki jabatan atau posisi yang ditawarkan dalam iklan lowongan pekerjaan. Meskipun sudah cukup umum, sayangnya masih banyak pengusaha maupun pegawai yang belum benar-benar memahami makna komitmen secara mendalam. Padahal, pemahaman yang kuat tentang komitmen sangat penting untuk menciptakan lingkungan kerja yang kondusif, sehingga perusahaan dapat berjalan secara efisien dan efektif.

Sumber daya manusia merupakan elemen yang sangat penting dalam mewujudkan tujuan sebuah organisasi. Kemampuan dari sumber daya manusia memiliki peran krusial dalam menyusun laporan keuangan nagari dengan tepat dan akurat, sehingga menghasilkan laporan keuangan berkualitas. Sumber daya manusia terdiri dari tenaga kerja yang dapat diukur berdasarkan latar belakang pendidikan mereka. Sumber daya manusia yang unggul bukan hanya memiliki keterampilan untuk menghasilkan pekerjaan yang baik, tetapi juga harus cerdas dalam menjalankan tugasnya, serta memahami beban dan tanggung jawab sebagai petugas pemerintahan (Hariyanti et al., 2019).

Dalam penyusunan APBNag, sumber daya manusia yang diperlukan adalah tenaga yang sudah terlatih dan profesional di bidangnya. Namun, di lapangan masih banyak ditemukan keterbatasan sumber daya manusia.

Pelaksanaan pemerintahan desa yang baik sulit tercapai jika kapasitas aparatur desa tidak memadai. Sumber daya manusia yang unggul mampu mengelola keterbatasan sumber daya alam untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan perekonomian di nagari. Permasalahan SDM dalam pengelolaan keuangan nagari, seperti rendahnya mutu tenaga akuntansi, ketidaksesuaian kompetensi dengan tuntutan pekerjaan, serta kurangnya jumlah SDM di desa (Eryana, 2018), mempengaruhi kemampuan nagari dalam mengelola dan mengawasi penggunaan APBNag. Ketidakmampuan dalam mengelola sumber daya dengan baik dapat membuka celah bagi praktik korupsi.

Selain komitmen dan sumber daya manusia, penyajian laporan keuangan menjadi aspek yang sangat penting dalam penyusunan APBNag. Laporan keuangan merupakan catatan informasi mengenai suatu entitas dalam periode akuntansi tertentu, yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja entitas tersebut. Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur yang mencakup posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Tujuan utama dari laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Secara khusus, tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk memberikan informasi yang berguna dalam pengambilan keputusan.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dijelaskan, peneliti tertarik untuk melaksanakan penelitian lebih lanjut yang membahas tentang pengaruh komitmen, sumber daya manusia, dan laporan keuangan terhadap penyusunan APBNag. Oleh karena itu, judul penelitian yang diambil adalah: **“Pengaruh Komitmen, Sumber Daya Manusia, dan Penyajian Laporan Keuangan terhadap Penyusunan APBNag (Studi Kasus pada Nagari Sungai Tarab, Nagari Padang Laweh, dan Nagari Pasie Laweh)”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tingkat ikhtiar dalam komitmen pemerintah dan instansi wali nagari dalam penyusunan APBNag belum efektif dan efisien.
2. Kurangnya keterampilan kinerja pegawai atau sumber daya manusia yang memiliki pengetahuan dan keahlian yang belum cukup memadai dalam bidang keuangan dalam menyusun APBNag.
3. Rendahnya keandalan dan kualitas laporan keuangan masih belum transparansi dan sah sehingga menghambat penyusunan APBNag secara optimal dan kurang terpercaya.
4. Rendahnya kompetensi dan komitmen sumber daya manusiis nagari karena tidak terjaminnya kesejahteraan pengurus nagari sehingga mengalami kesulitan dalam bekerja secara efektif dan bekerjasama dengan baik sehingga dapat mempengaruhi kualitas penyusunan APBNag.
5. Rendahnya tata kelola dalam memahami bagaimana komitmen, sumber daya manusia, dan laporan keuangan saling berkaitan dan memiliki dampak terhadap penyusunan APBNag.

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, peneliti membatasi fokus penelitian pada Faktor-Faktor Seperti Komitmen, Sumber Daya Manusia, Dan Penyajian Laporan Keuangan yang berpengaruh terhadap penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APBNag) di tiga nagari di Kabupaten Tanah Datar, yaitu Nagari Sungai Tarab, Nagari Pasie Laweh, dan Nagari Padang Laweh.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, permasalahan yang akan diteliti adalah:

1. Apakah Factor Komitmen berpengaruh terhadap penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APBNag) di Nagari Sungai Tarab, Nagari Pasie Laweh, dan Nagari Padang Laweh?
2. Apakah Faktor Sumber Daya Manusia berpengaruh terhadap penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APBNag) di Nagari Sungai Tarab, Nagari Pasie Laweh, dan Nagari Padang Laweh?
3. Apakah Factor Laporan Keuangan berpengaruh terhadap penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APBNag) di Nagari Sungai Tarab, Nagari Pasie Laweh, dan Nagari Padang Laweh?
4. Apakah Factor Komitmen, Faktor Sumber Daya Manusia, dan Factor Laporan Keuangan berpengaruh secara simultan terhadap penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APBNag) di Nagari Sungai Tarab, Nagari Pasie Laweh, dan Nagari Padang Laweh?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengetahui dan mendefenisikan pengaruh Komitmen terhadap penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APBNag) di Nagari Sungai Tarab, Nagari Pasie Laweh, dan Nagari Padang Laweh.
2. Untuk mengetahui dan mendefenisikan pengaruh Sumber Daya Manusia terhadap penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APBNag) di Nagari Sungai Tarab, Nagari Pasie Laweh, dan Nagari Padang Laweh.
3. Untuk mengetahui dan mendefenisikan pengaruh Laporan Keuangan terhadap penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APBNag) di Nagari Sungai Tarab, Nagari Pasie Laweh, dan Nagari Padang Laweh.
4. Untuk mengetahui dan mendefenisikan pengaruh Faktor Komitmen, Faktor Sumber Daya Manusia, dan Faktor Laporan Keuangan terhadap penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APBNag) di Nagari Sungai Tarab, Nagari Pasie Laweh, dan Nagari Padang Laweh.

F. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian yang dilakukan, diharapkan dapat memberikan manfaat, antara lain:

1. Mahasiswa/penulis, Penelitian ini diharapkan menambah wawasan dan ilmu pengetahuan tentang akuntansi pemerintahan yang digunakan oleh pemerintah Nagari Sungai Tarab, Nagari Pasie Laweh, dan Nagari Padang Laweh.
2. Bagi peneliti selanjutnya, Penelitian ini diharapkan menjadi pandangan dan pembanding untuk penulisan skripsi atau jurnal yang berhubungan dengan akuntansi pemerintahan.
3. Bagi Pemerintah Nagari Sungai Tarab, Nagari Pasie Laweh, Nagari Padang Laweh, dan pada Kabupaten Tanah Datar yakni Sebagai bahan masukan bagi seluruh pegawai pemerintah Nagari Sungai Tarab, Nagari Pasie Laweh, dan Nagari Padang Laweh.
4. Bagi masyarakat dan pengguna laporan keuangan pemerintah daerah Dapat memberikan pengetahuan mengenai kondisi akuntansi pemerintahan yang dialami oleh Pemerintah Nagari Sungai Tarab, Nagari Pasie Laweh, dan Nagari Padang Laweh.

G. Defenisi Operational

Penelitian ini berjudul “Pengaruh Komitmen, Sumber Daya Manusia, dan Penyajian Laporan Keuangan terhadap Penyusunan APBNag (Studi Kasus pada Nagari Sungai Tarab, Nagari Padang Laweh, dan Nagari Pasie Laweh)”. Untuk menghindari kesalahpahaman antara penulis dan pembaca serta memperoleh pemahaman yang jelas mengenai penelitian ini, penulis memberikan penjelasan tentang konsep-konsep yang digunakan dalam penelitian sebagai berikut.

Komitmen adalah salah satu faktor kunci yang menentukan keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuannya. Karyawan yang memiliki komitmen terhadap organisasi biasanya menunjukkan sikap kerja yang penuh perhatian terhadap tugas-tugas mereka. Mereka memiliki

tanggung jawab yang tinggi dalam melaksanakan kewajiban serta sangat loyal terhadap perusahaan.

Sumber daya manusia (SDM) merupakan faktor kunci bagi keberhasilan suatu organisasi. Setiap pegawai diharapkan memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang memadai, serta harus didukung oleh pengalaman, motivasi, disiplin, dan semangat kerja yang tinggi. Dengan demikian, kinerja organisasi dapat meningkat dan tujuan organisasi pun dapat tercapai.

Laporan keuangan merupakan tahap akhir dari proses akuntansi yang memiliki peranan penting dalam mengukur dan menilai kinerja sebuah perusahaan. Laporan keuangan bertujuan untuk memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja, dan arus kas perusahaan, yang bermanfaat bagi berbagai pihak dalam membuat keputusan ekonomi. Selain itu, laporan keuangan juga berfungsi untuk menunjukkan pertanggungjawaban (*stewardship*) manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka.

Penyusunan APBNag adalah rencana keuangan satu tahun di nagari yang mencakup proyeksi pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan, serta rencana pembiayaan, yang ditinjau dan disahkan bersama oleh pemerintah nagari dan badan permusyawaratan nagari, serta diatur melalui peraturan nagari. Rencana pembangunan nagari disusun berdasarkan hasil kesepakatan dalam musyawarah nagari, di mana partisipasi aktif dari berbagai pihak diikutsertakan dalam prosesnya. Selain itu, penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nagari dan Rencana Kerja Pemerintah Nagari (RKP Nagari) dilakukan melalui musyawarah perencanaan pembangunan nagari secara partisipatif. RPJM Nagari dan RKP Nagari dapat diukur melalui analisis penggunaan anggaran nagari, apakah sudah tepat sasaran, serta tersalurkan dengan baik. Hal ini meliputi akurasi dalam pengalokasian anggaran dan kepatuhan terhadap kaidah serta kebijakan yang berlaku.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Landasan Teori

1. Teori *Stewardship* (*Stewardship Theory*)

Menurut Surifah & Rofiqoh (2020) Adalah kerangka kerja yang berfokus pada tanggung jawab pengelolaan organisasi dan sumber daya dengan tujuan mencapai keberlanjutan jangka panjang dan meningkatkan nilai organisasi sambil memperhatikan kepentingan para pemangku kepentingan (*stakeholders*). Teori *stewardship* juga sangat berperan penting dalam budaya kerja yang berfokus pada kepentingan bersama dan pelayanan kepada organisasi secara keseluruhan, dibandingkan dengan fokus pada kepentingan atau insentif pribadi. Teori ini menekankan pada hubungan antara pihak yang bertanggung jawab mengelola sumber daya (*steward*) dengan pihak yang memiliki kepentingan atau pemilik sumber daya tersebut (*principal*), di mana terjalin kesepakatan dan kepercayaan untuk mencapai tujuan organisasi.

Dalam konteks penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), prinsip-prinsip teori *Stewardship* dapat diterapkan dengan memberikan fokus pada tanggung jawab, kepercayaan, dan keterlibatan pihak-pihak yang terlibat dalam proses penyusunan anggaran. Ini termasuk pemerintahan nagari, sumber daya manusia, dan penggunaan laporan keuangan sebagai alat pengendalian (Surifah & Rofiqoh, 2020).

Aspek-aspek yang ditekankan oleh teori *Stewardship* dalam konteks penyusunan APBN termasuk:

- a. Tanggung Jawab dan Kepercayaan: Pemerintah bertindak sebagai "*steward*" yang bertanggung jawab atas pengelolaan sumber daya publik. Ada kepercayaan yang harus dijaga antara pemerintah sebagai pengelola (*steward*) dengan rakyat sebagai pemilik sumber daya (*principal*).

- b. Kepentingan Para Pemangku (*Stakeholders*): Teori ini menekankan pentingnya mempertimbangkan kepentingan para pemangku, kepentingan yang beragam, termasuk masyarakat umum, dalam proses pengelolaan sumber daya publik.
- c. Hubungan antara Kepuasan dan Kesuksesan Organisasi: Teori *Stewardship* menekankan bahwa kepuasan para pemangku kepentingan akan berkontribusi pada kesuksesan jangka panjang organisasi. Dalam hal ini, pemerintah sebagai steward harus memastikan bahwa kebijakan anggaran yang disusun memenuhi kebutuhan dan kepuasan masyarakat umum.
- d. Pertanggungjawaban Publik: Organisasi sektor publik bertujuan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat umum dan harus dipertanggungjawabkan kepada publik atas penggunaan sumber daya yang mereka kelola.

Dengan menerapkan prinsip-prinsip teori *Stewardship*, diharapkan bahwa pengelolaan APBN akan lebih transparan, bertanggung jawab, dan mempertimbangkan kepentingan masyarakat secara keseluruhan.

Menurut Implikasi dari teori *Stewardship* dalam konteks penelitian ini adalah:

- a. Pengelolaan Sumber Daya: Teori *Stewardship* menyoroti tanggung jawab pemerintah nagari sebagai pengelola sumber daya. Hal ini mencakup pengelolaan secara efektif dan efisien terhadap sumber daya yang ada di nagari serta menjaga agar penggunaannya sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- b. Pelaksanaan Tugas yang Dipercayakan: Kepala nagari dan aparatur nagari memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan tugas yang telah dipercayakan kepada pemerintah nagari. Dalam kerangka teori *Stewardship*, hal ini mengindikasikan bahwa mereka bertanggung jawab menjalankan peran mereka dengan penuh integritas dan transparansi.

- c. Pertanggungjawaban dan Transparansi: Teori *Stewardship* menekankan pentingnya pertanggungjawaban pemerintah nagari kepada masyarakat terkait dengan pengelolaan sumber daya. Memberikan informasi secara berkala kepada masyarakat tentang kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah nagari adalah upaya nyata untuk memenuhi kewajiban pertanggungjawaban. Ini mencakup memberikan laporan atau transparansi mengenai penggunaan sumber daya serta kepatuhan terhadap peraturan dan undang-undang yang berlaku.
- d. Wadah Aspirasi Masyarakat: Sebagai wadah aspirasi masyarakat, pemerintah nagari memiliki peran dalam menerima, memahami, dan mengakomodasi aspirasi serta kebutuhan masyarakat setempat. Dalam kerangka teori *Stewardship*, hal ini menunjukkan bahwa pemerintah nagari bertanggung jawab untuk mewakili kepentingan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan sumber daya.

Dengan mengikuti prinsip-prinsip teori *Stewardship*, pemerintah nagari diharapkan dapat bertindak secara bertanggung jawab, transparan, dan konsisten dalam pengelolaan sumber daya serta menjalankan tugasnya sesuai dengan kepentingan masyarakat yang mereka wakili.

Adapun Dalam konteks penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APBNag) di tiga nagari yang ada di Tanah Datar, teori *Stewardship* dapat memberikan wawasan tentang bagaimana komitmen, sumber daya manusia, dan laporan keuangan dapat memengaruhi proses penyusunan anggaran tersebut. Berikut adalah implikasi teori *Stewardship* terhadap faktor-faktor yang disebutkan:

- a. Komitmen: Teori *Stewardship* menekankan pentingnya komitmen pemerintah dalam pengelolaan sumber daya dan tanggung jawab terhadap pemenuhan kebutuhan masyarakat. Komitmen ini mencakup keseriusan dan keberlanjutan pemerintah nagari dalam memastikan bahwa anggaran yang disusun memperhatikan kebutuhan dan kepentingan masyarakat.

- b. Sumber Daya Manusia: Faktor sumber daya manusia, seperti keterampilan, pengetahuan, dan kompetensi aparat pemerintahan di nagari, sangat relevan dalam teori *Stewardship*. Pemerintah nagari harus memiliki sumber daya manusia yang kompeten dan berintegritas tinggi dalam mengelola anggaran secara efisien, transparan, dan akuntabel.
- c. Penyajian Laporan Keuangan: Teori *Stewardship* menyoroti pentingnya laporan keuangan sebagai alat pengendalian dan pertanggungjawaban dalam pengelolaan sumber daya. Penggunaan laporan keuangan yang tepat dan teratur dapat membantu pemerintah nagari dalam memonitor pengeluaran, mengevaluasi kinerja keuangan, dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.

Dengan memahami teori *Stewardship*, pemerintah nagari dapat menggabungkan komitmen yang kuat, sumber daya manusia yang berkualitas, dan penggunaan laporan keuangan yang baik dalam proses penyusunan APBNag. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa alokasi anggaran dilakukan secara efektif, efisien, dan transparan sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan masyarakat di tiga nagari yang ada di Tanah Datar.

2. Desa (Nagari)

Secara etimologi, kata desa atau nagari berasal dari bahasa Sansekerta, yaitu deca, yang berarti tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran. Dari perspektif geografis, desa atau village merujuk pada “sekumpulan rumah atau toko di daerah pedesaan, yang lebih kecil dibandingkan kota”. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki wewenang untuk mengatur urusan rumah tangganya berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam Pemerintahan Nasional, atau yang berada di wilayah Kabupaten.

Menurut UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah, berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, serta hak

tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan desa merupakan subsistem dari penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan desa dipimpin oleh seorang Kepala Desa, yang dibantu oleh perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

Sebagaimana yang dibahas dalam Peraturan Provinsi Sumatra Barat No. 7 tahun 2018 tentang Nagari, yakni sebuah istilah yang berasal dari bahasa Minangkabau, suku yang mendiami wilayah Sumatera Barat, Indonesia. Istilah ini merujuk pada sebuah unit administratif atau nagari yang terdapat di wilayah tradisional Minangkabau. Nagari terdiri dari beberapa dusun atau jorong yang dipimpin oleh seorang kepala nagari yang disebut "Kepala Nagari." Sistem nagari juga memiliki struktur pemerintahan sendiri yang diatur oleh adat istiadat tradisional Minangkabau. Konsep nagari ini memiliki keunikan tersendiri dalam tatanan pemerintahan Indonesia karena menjaga tradisi adat serta kearifan lokal dalam pengaturan administrasi dan kehidupan masyarakat setempat berdasarkan filosofi dan sandi adat, "Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah".

Desa memiliki wewenang yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, antara lain:

- a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi hak asal-usul desa.
- b. Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota, yang diserahkan pengaturannya kepada desa, terutama urusan pemerintahan yang secara langsung berdampak pada peningkatan pelayanan masyarakat.
- c. Menjalankan tugas pembantuan dari pemerintahan provinsi dan pemerintahan kabupaten/kota.

- d. Mengelola urusan pemerintahan lainnya yang berdasarkan peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa.

Desa juga memiliki hak dan kewajiban yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Hak desa meliputi:

- a. Mengatur dan mengelola kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal-usul, adat istiadat, serta nilai-nilai sosial dan budaya masyarakat setempat.
- b. Menetapkan dan mengelola lembaga-lembaga desa.
- c. Memperoleh sumber pendapatan desa.

Kewajiban desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah sebagai berikut:

- a. Menjaga dan melindungi persatuan, kesatuan, serta kerukunan masyarakat desa demi mendukung harmoni nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa.
- c. Mendorong pengembangan kehidupan demokrasi di tingkat desa.
- d. Mengoptimalkan pemberdayaan masyarakat desa.
- e. Memberikan serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa.

3. Komitmen Organisasi

a. Pengertian Komitmen

Komitmen adalah suatu kesepakatan yang dilakukan oleh diri sendiri, individu, maupun berkelompok atau suatu organisasi sekalipun. Komitmen merupakan kesetiaan seseorang terhadap organisasi, komitmen terhadap suatu organisasi yang tinggi memungkinkan seseorang untuk dapat mengidentifikasi dirinya dengan organisasi. Komitmen berpihak terhadap anggota organisasi secara nyata terlibat aktif dalam berkontribusi kepada organisasinya. Pada tingkat komitmen yang tinggi menimbulkan rasa peduli, memiliki sampai rasa keterikatan terhadap sesama dan anggota terhadap suatu organisasi.

Dalam lingkungan satuan kerja perangkat daerah, pegawai atau karyawan daerah harus memiliki komitmen untuk memanfaatkan seluruh informasi yang dimiliki dan diperoleh guna menghasilkan laporan keuangan yang akurat dan relevan. Oleh karena itu, lembaga pemerintahan perlu berkomitmen dalam menyusun laporan keuangannya, dengan senantiasa berupaya memenuhi ketentuan yang berlaku serta menyajikan informasi yang jelas dan berkualitas.

Menurut Armstrong (2006), komitmen adalah kondisi di mana seorang individu merasa terikat melalui tindakan dan keyakinannya, sehingga terus aktif dan terlibat dalam aktivitas tersebut. Terdapat tiga aspek penting dalam perilaku yang mengikat individu terhadap tindakannya, yaitu tingkat keterlihatan tindakan, sejauh mana hasil tindakan tersebut tidak dapat dibatalkan, serta tingkat kesukarelaan individu dalam melaksanakan tindakan tersebut. Komitmen dapat ditingkatkan dan dimanfaatkan untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi, salah satunya melalui partisipasi aktif dalam proses pengambilan keputusan.

Komitmen terhadap pekerjaan sering menjadi isu yang sangat krusial. Karena pentingnya hal ini, beberapa instansi menjadikan komitmen sebagai salah satu syarat utama untuk menduduki jabatan atau posisi tertentu yang ditawarkan dalam lowongan pekerjaan. Meskipun sudah menjadi hal yang umum, masih banyak instansi maupun aparat pemerintah yang belum sepenuhnya memahami makna komitmen secara mendalam. Padahal, pemahaman yang baik tentang komitmen sangat penting untuk menciptakan kondisi kerja yang kondusif, sehingga instansi pemerintah dapat beroperasi secara efisien dan efektif (Lubis & Jaya, 2019).

Organisasi atau instansi dapat didefinisikan sebagai sebuah sistem sosial yang berorientasi pada pencapaian tujuan tertentu, di mana setiap anggotanya memiliki peran untuk memberikan pelayanan terbaik demi mewujudkan tujuan tersebut. Pelayanan yang diberikan oleh

anggota instansi memerlukan adanya komitmen, yaitu kesediaan mereka untuk mendukung instansi, sehingga tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai (Apriana et al., 2020).

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa komitmen adalah kondisi di mana seseorang bersedia mendukung dan konsisten dengan pilihannya. Individu yang memiliki tekad kuat, kesediaan untuk berusaha demi kemajuan organisasi, serta keyakinan terhadap nilai-nilai organisasi dapat dikategorikan sebagai individu yang memiliki komitmen tinggi dalam organisasi atau kelompoknya. Ketika seseorang berkomitmen pada suatu organisasi atau kelompok, ia diharapkan mampu menyesuaikan diri dengan nilai dan norma yang berlaku serta bergerak sejalan untuk mencapai tujuan bersama organisasi tersebut.

Menurut uraian di atas, komitmen organisasi lebih dari sekedar loyalitas terhadap perusahaan, tetapi melebihi proses yang berkelanjutan di mana karyawan menunjukkan kepedulian terhadap organisasi dan kinerjanya dalam suatu pekerjaan. Komitmen organisasi sebagai sikap karyawan yang akan menentukan tingkah lakunya sebagai ekspresi sikap.

b. Komponen-Komponen Komitmen

Diantara komponen-komponen komitmen yaitunya (Idrus, 2022):

- 1) Komitmen afektif merujuk pada keterikatan emosional, identifikasi, dan keterlibatan karyawan terhadap organisasi. Hal ini mencerminkan hubungan emosional yang mendalam antara karyawan dan organisasi. Karyawan yang memiliki komitmen afektif yang tinggi cenderung tetap bekerja di organisasi karena adanya keinginan kuat dari dalam diri mereka untuk melakukannya.
- 2) Komitmen berkelanjutan berkaitan dengan kesadaran akan biaya atau konsekuensi yang mungkin timbul jika meninggalkan organisasi. Hal ini menunjukkan bahwa karyawan mempertimbangkan keuntungan dan kerugian yang terkait dengan

keputusan untuk tetap bekerja atau meninggalkan pekerjaannya. Komitmen berkelanjutan mencerminkan kesadaran bahwa kehilangan besar dapat terjadi jika memilih perilaku atau identitas sosial yang berbeda. Karyawan yang didorong oleh komitmen ini biasanya tetap bertahan dalam pekerjaannya karena merasa harus melakukannya (need to) akibat kurangnya alternatif lain. Karena didasari oleh pertimbangan rasional mengenai manfaat dan risiko, komitmen ini sering disebut sebagai komitmen rasional.

- 3) Komitmen normatif mencerminkan perasaan kewajiban untuk tetap bekerja di organisasi. Dengan kata lain, komitmen ini merujuk pada rasa tanggung jawab moral untuk melanjutkan pekerjaan di lembaga tersebut. Karyawan dengan komitmen normatif yang tinggi merasa bahwa mereka harus (ought to) bertahan di organisasi. Komponen ini mencerminkan tekanan normatif yang telah terinternalisasi, mendorong individu untuk berperilaku sesuai dengan tujuan dan kepentingan organisasi. Oleh karena itu, tindakan karyawan didasarkan pada keyakinan tentang "apa yang benar" dan melibatkan aspek moralitas.

Selain itu, penting juga adanya komitmen dari para pimpinan, dengan tekad yang kuat dari seorang pemimpin untuk mencapai tujuan organisasi. Komitmen pimpinan yang tinggi akan secara signifikan mempengaruhi pengelolaan keuangan nagari. Setiap kepala nagari mungkin memiliki tingkat komitmen yang berbeda-beda, tetapi pada intinya, komitmen para pemimpin ini memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk mensejahterakan masyarakat. Hal ini dapat terlihat dari pengelolaan keuangan yang dilakukan secara tepat sasaran, tanpa adanya praktik pungutan liar, serta setiap laporan yang dibuat harus melewati proses verifikasi sebelum diterima. Pimpinan yang memiliki komitmen yang tinggi akan memiliki pandangan yang positif dan terus berusaha menjalankan tugas dengan baik demi kepentingan instansinya (Davici, 2018).

c. Tujuan serta Manfaat Komitmen

Mengurangi biaya pergantian pegawai yang tinggi. Seorang karyawan yang berkomitmen cenderung enggan untuk meninggalkan pekerjaannya dan lebih memilih untuk tetap bertahan. Ketika seorang pegawai memiliki komitmen yang kuat terhadap organisasi, maka risiko pergantian karyawan yang tinggi dapat diminimalisir. Komitmen terhadap organisasi memengaruhi keputusan seorang pegawai apakah akan tetap menjadi anggota organisasi atau mencari pekerjaan lain. Pergantian karyawan bisa terjadi secara sukarela atau bahkan melalui pemutusan hubungan kerja oleh organisasi. Karyawan yang memiliki komitmen yang kuat akan cenderung bertahan sebagai anggota organisasi, sementara mereka yang kurang berkomitmen akan lebih mudah menarik diri atau meninggalkan organisasi.

Mengurangi kebutuhan supervisi pegawai. Karyawan yang berkomitmen dan memiliki keahlian tinggi cenderung memerlukan supervisi yang lebih minimal. Dengan tingkat komitmen yang tinggi, karyawan dapat bekerja lebih mandiri dan efisien, sehingga mengurangi kebutuhan akan supervisi yang ketat. Hal ini membantu mengurangi pemborosan waktu dan biaya yang seharusnya digunakan untuk pengawasan yang berlebihan.

Meningkatkan efektivitas organisasi. Ketidakhadiran komitmen dapat berdampak negatif pada efektivitas organisasi. Organisasi yang memiliki pegawai yang berkomitmen akan cenderung mencapai hasil yang diinginkan, seperti kinerja yang tinggi, tingkat pergantian pegawai yang rendah, dan absensi yang minim. Selain itu, komitmen juga menciptakan iklim organisasi yang kondusif, mendukung kolaborasi antar anggota tim, serta memfasilitasi kerjasama yang baik untuk mencapai tujuan bersama.

d. Implikasi Keterlibatan Komitmen Terhadap Penyusunan APBNag

Dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Nagari (APBNag), komitmen merupakan suatu faktor terpenting karena

merupakan tahapan yang kompleks dan melibatkan semua pihak didalam penyelenggaraan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja nagari (APBNag) tersebut. Diantaranya, beberapa implikasi keterlibatan komitmen terhadap penyusunan APBNag anantara lain yakni:

- 1) Meningkatkan akuntabilitas, yaitu Komitmen yang kuat terhadap penyusunan APBNag dapat membantu memastikan bahwa dana yang dialokasikan dari APBNag digunakan dengan tepat dan akuntabel. Hal ini akan membantu memperkuat transparansi dan kepercayaan publik pada pemerintahan nagari.
- 2) Mempercepat proses, yaitu Dengan adanya komitmen dari berbagai pihak yang terlibat didalam penyusunan APBNag, dimana proses dapat menjadi lebih efisien dan efektif. Hal ini dapat mempercepat proses penyusunan dan pengesahan dari APBNag.
- 3) Meningkatkan kualitas, yaitu Komitmen yang kuat terhadap penyusunan APBNag dapat membantu memastikan kualitas APBNag yang lebih baik. Hal ini dapat membantu memastikan bahawa APBNag tidak hanya mengalokasikan dana secara acak, tetapi juga mengikuti prioritas dan tujuan yang jelas.
- 4) Menghindari konflik, yaitu Komitmen yang kuat dari berbagai pihak yang memiliki keterlibatan dalam penyusunan APBNag dapat membantu mencegah konflik dan ketidaksepakatan dalam proses tersebut. Hal ini akan membantu memastikan bahwa APBNag dengan harmonis dan efektif.
- 5) Meningkatkan efektivitas, yaitu Komitmen yang kuat dari berbagai pihak dan ikut terlibat dalam penyusunan APBNag dapat membantu memastikan bahwa APBNag yang disusun dapat mencapai tujuannya dengan lebih efektif. Hal ini dapat membantu memastikan bahwa APBNag tidak hanya mengalokasikan dana secara acak, tetapi juga mengikuti tujuan yang jelas dan terukur.

Dari implikasi keterlibatan komitmen terhadap penyusunan APBNag diatas dapat dilihat Keterlibatan dari semua pihak yang ikut didalam penyusunan APBNag sangat penting untuk memastikan penyusunan APBNag yang efektif dan efisien, serta memperkuat transparansi dan kepercayaan publik pada pemerintah.

4. Sumber Daya Manusia

Secara umum, pengertian sumber daya manusia adalah semua individu yang merupakan bagian dari populasi atau warga negara di suatu wilayah tertentu, yang telah memasuki usia angkatan kerja, baik yang sudah memiliki pekerjaan maupun yang belum. Selain itu, sumber daya manusia juga merujuk pada penduduk usia produktif, meskipun masih ada berbagai faktor dan tantangan yang menyebabkan mereka belum terlibat dalam lapangan pekerjaan di masyarakat.

Sumber daya manusia merujuk pada individu yang bekerja dan berperan sebagai aset organisasi atau perusahaan, yang dapat dihitung secara kuantitatif. Dalam konteks ini, sumber daya manusia tidak berbeda dari fungsi aset lainnya, sehingga dikelompokkan dan dianggap sebagai sarana produksi, seperti mesin, komputer (sumber daya teknologi), investasi (sumber daya finansial), gedung, mobil, dan lainnya.

Sumber daya manusia yang dimaksud adalah karyawan atau pegawai negeri sipil yang bekerja dalam sebuah pemerintahan. Apabila sumber daya manusia memiliki kompetensi dan kualitas yang baik, maka mereka dapat membantu pemerintah dalam mewujudkan pemerintahan yang efektif dan disiplin waktu. Bagi perusahaan, investasi pada sumber daya manusia sangat penting karena dapat memberikan dampak signifikan terhadap kemajuan perusahaan. Sumber daya manusia adalah faktor yang harus dikelola dengan serius oleh perusahaan, karena memiliki potensi untuk menghasilkan keuntungan operasional yang melebihi ekspektasi sebelumnya (Wibowo, 2020).

Kemampuan sumber daya manusia untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab yang diberikan bergantung pada pelatihan dan

pengalaman yang cukup. Oleh karena itu, pengelolaan sumber daya manusia harus dilakukan dengan baik agar organisasi dapat mencapai tujuannya secara optimal. Sumber daya manusia merupakan elemen kunci dalam sebuah organisasi, dan pengelolaannya yang efektif dapat membantu mendorong keberhasilan organisasi (Zubaidi et al., 2019).

Dapat disimpulkan bahwa Sumber Daya Manusia (SDM) merujuk pada orang-orang yang terlibat dalam pelaksanaan organisasi di berbagai tingkatan, mulai dari pimpinan atau manajer puncak, manajer menengah, hingga staf atau karyawan, termasuk di dalamnya investor atau pemodal. Sumber daya manusia merupakan aset paling berharga bagi suatu organisasi karena mereka memberikan kerja, bakat, kreativitas, dan semangat yang diperlukan untuk mencapai tujuan organisasi. Kendala pada sumber daya manusia sering kali menjadi sumber masalah dalam organisasi. Konsekuensinya adalah perlunya SDM yang memiliki kapasitas untuk merancang dan menjalankan program kegiatan, yang ditentukan oleh kapabilitas, kompetensi, dan produktivitas kerja.

Kapabilitas sumber daya manusia yang berfokus pada pengetahuan dan keterampilan menjadi faktor kunci dalam menentukan keberhasilan seseorang dalam menyelesaikan pekerjaan secara optimal. Masalah terkait sumber daya manusia tetap menjadi perhatian utama bagi perusahaan untuk dapat bertahan di era globalisasi. Sumber daya manusia memainkan peran sentral dalam setiap aktivitas perusahaan. Meskipun didukung dengan sarana, prasarana, serta sumber dana yang memadai, tanpa dukungan sumber daya manusia yang kompeten, kegiatan perusahaan tidak akan dapat berjalan dengan baik. Hal ini menunjukkan bahwa sumber daya manusia merupakan elemen kunci yang perlu diperhatikan secara mendalam beserta segala kebutuhannya.

Indikator sumber daya manusia yang pada umumnya digunakan sebagai penentu dalam sebuah teori penelitian yaitunya (Tsauri, 2020) :

- a. Pengetahuan yaitu mampu melaksanakan tugas dengan terampil, kreatif, dan inovatif.

- b. Pemahaman yaitu memiliki daya tanggap dan sikap bertanggung jawab dalam melaksanakan kewenangannya.
- c. Keterampilan yaitu memiliki keterampilan yang dipersyaratkan dalam pengelolaan tugas publik untuk mengemban tugas.
- d. Sikap yaitu memiliki komitmen tinggi untuk mencapai tujuan instansinya serta disiplin dalam bekerja dan mampu memaksimalkan efisiensi, kualitas, dan produktivitas yang diberikan.

Dengan strategi tersebut, setidaknya sumber daya manusia dalam organisasi akan berupaya menyesuaikan diri dengan tantangan global yang cenderung tidak terbatas. Oleh karena itu, sumber daya manusia (SDM) memegang peranan penting dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APBNag). Berikut beberapa pengaruh sumber daya manusia (SDM) terhadap penyusunan APBNag:

- a. Kompetensi: Kemampuan dan kompetensi sumber daya manusia yang memadai dalam penyusunan APBNag sangat penting untuk memastikan bahwa anggaran dapat disusun dengan akurat dan tepat waktu. Sumber daya manusia yang memiliki keahlian yang baik di bidang keuangan dan manajemen anggaran dapat membantu memastikan bahwa APBNag dirancang sesuai dengan prinsip-prinsip keuangan yang sehat.
- b. Keterlibatan: Keterlibatan sumber daya manusia yang cukup dalam penyusunan APBNag sangat penting untuk memastikan bahwa anggaran disusun dengan akurat dan tepat waktu. Sumber daya manusia yang terlibat langsung dalam proses ini, seperti pegawai di kementerian keuangan atau Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), perlu memiliki keterampilan dan pengalaman yang memadai untuk dapat memberikan kontribusi yang efektif dalam proses tersebut.
- c. Pengawasan, yaitu Sumber daya manusia yang diperlukan untuk pengawasan dan evaluasi APBNag juga sangat penting. Dilembaga pengawas seperti BPK dan KPK harus memiliki kompetensi dan integritas yang tinggi untuk memastikan bahwa APBNag dijalankan dengan baik dan transparan.

- d. Peningkatan kualitas, yaitu Pemerintah harus menginvestasikan dalam pelatihan dan mengembangkan Sumber Daya Manusia yang terlibat dalam penyusunan APBNag. Pelatihan dan pengembangan ini dapat membantu meningkatkan keterampilan dan kompetensi Sumber Daya Manusia didalam berbagai bidang keuangan dan manajemen anggaran, serta membantu meningkatkan kualitas APBNag.
- e. Pengaruh politik, yaitu Sumber Daya Manusia dimana didalam proses penyusunan APBNag tersebut juga harus dapat menjaga independensinya dari pengaruh politik. Hal ini penting untuk memastikan bahwa APBNag disusun dengan berdasarkan pada fakta dan kebutuhan masyarakat, bukan dipengaruhi oleh kepentingan politik atau kepentingan pribadi.

Dari uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa Sumber daya manusia (SDM) berperan penting dalam proses penyusunan APBNag. Kompetensi, keterlibatan, pengawasan, pelatihan, dan bahkan pengembangan, serta indenpendensi Sumber Daya Manusia dalam tahap ini sangat perlu untuk mamstikan penyusunan APBNag yang efektif, transparan, dan akuntabel.

5. Penyajian Laporan Keuangan

Penyajian laporan keuangan merupakan penyajian terorganisir yang mencakup posisi keuangan dan hasil kinerja suatu entitas. Tujuan utama laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang berkaitan dengan posisi keuangan, kinerja, serta perubahan dalam posisi keuangan, yang bermanfaat bagi berbagai pihak dalam pengambilan keputusan ekonomi.

Laporan keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan negara atau daerah, yang mencerminkan kinerja keuangan suatu pemerintahan selama satu periode kepada publik. Kualitas laporan keuangan Pemerintah Desa dapat diukur melalui pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Pemeriksaan laporan keuangan bertujuan memberikan pendapat atau opini tentang kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam

laporan keuangan, yang merupakan output dari proses akuntansi atau ringkasan transaksi keuangan. Tujuan utama dari laporan keuangan adalah memberikan informasi yang bermanfaat bagi pengguna mengenai kondisi keuangan entitas pelaporan, pelaksanaan anggaran, arus kas, serta hasil pengambilan keputusan dan evaluasi alokasi sumber daya (Gamayuni, 2018).

Laporan keuangan bertujuan untuk menyajikan informasi keuangan bisnis secara jelas dan terperinci bagi entitas serta pembacanya. Biasanya, laporan keuangan bisnis meliputi laporan laba rugi, neraca, laporan laba ditahan, dan laporan arus kas, meskipun mungkin diperlukan pengungkapan tambahan tergantung pada sistem akuntansi yang berlaku. Laporan keuangan sering kali diaudit oleh berbagai pihak seperti organisasi pemerintah, akuntan, dan bisnis untuk memastikan validitasnya. Kinerja keuangan mencerminkan hasil ekonomi yang dapat dicapai oleh sebuah bisnis dalam periode tertentu melalui aktivitas yang dilakukan untuk menghasilkan keuntungan secara efektif dan efisien.

Menurut Permen No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, laporan keuangan adalah pelaporan yang harus disusun secara terintegrasi berdasarkan bentuk keuangan dan transaksi yang dilakukan oleh entitas pelapor keuangan. Laporan keuangan menjadi keluaran dari suatu sistem akuntansi yang berguna dalam mengkomunikasikan informasi kepada para pihak dan pengguna informasi laporan keuangan sebagai pondasi dalam pengambilan keputusan. pelaporan keuangan memiliki fungsi lain yaitu sebagai alat untuk menilai akuntabilitas dan efektifitas khususnya terhadap kinerja keuangan.

Laporan keuangan yang dikeluarkan oleh desa, seperti pembukuan desa, merujuk pada catatan transaksi yang terjadi di desa. Proses ini dilakukan berdasarkan bukti-bukti transaksi seperti nota, yang kemudian dicatat dalam laporan keuangan. Laporan keuangan ini memberikan informasi yang digunakan oleh pihak berwenang di desa untuk keperluan pengelolaan dan pengambilan keputusan.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan pada umumnya merupakan bentuk penyajian terstruktur yang menunjukkan posisi keuangan dan kinerja suatu entitas. Tujuannya adalah untuk memberikan informasi terkait kondisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan perusahaan yang bermanfaat bagi sebagian besar pengguna dalam pengambilan keputusan. Laporan keuangan ini biasanya mencakup neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, serta catatan atas laporan keuangan.

Laporan keuangan sangat penting dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja nagari (APBNag) karena memberikan informasi penting tentang kinerja keuangan pemerintahan dan sumber daya keuangan yang tersedia. Berikut adalah beberapa pengaruh laporan keuangan terhadap penyusunan APBNag yakni:

- a. Informasi keuangan, yaitu Laporan keuangan memberikan informasi penting tentang keadaan keuangan negara, termasuk pendapatan, belanja, dan neraca keuangan. Informasi ini digunakan oleh pemerintah untuk mengevaluasi kebijakan fiskal dan merencanakan anggaran untuk tahun-tahun mendatang.
- b. Akuntabilitas, yaitu Laporan keuangan juga memainkan peran penting dalam menjaga akuntabilitas pemerintah terhadap publik. Dengan menyajikan informasi keuangan yang akurat dan transparan, pemerintah dapat menunjukkan bagaimana sumber daya keuangan publik digunakan dan dipertanggungjawabkan.
- c. Pengawasan, yaitu Laporan keuangan juga digunakan oleh badan pengawas seperti BPK pengauditan dan pengawasan terhadap keuangan pemerintah. Informasi dalam laporan keuangan bisa membantu dalam menentukan apakah pengeluaran pemerintah sesuai dengan kebijakan dan peraturan yang berlaku.
- d. Evaluasi, yaitu Laporan keuangan juga dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja keuangan pemerintah dalam jangka waktu

tertentu. Hal ini dapat membantu pemerintah merencanakan strategi dan kebijakan fiskal untuk di masa depan.

- e. Transparansi, yaitu Laporan keuangan juga dapat membantu dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas pemerintah terhadap publik. Dengan menyajikan informasi keuangan yang lengkap dan transparan, pemerintah dapat menunjukkan bagaimana sumber daya keuangan publik digunakan dan dipertanggungjawabkan.

6. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Nagari (APBNag)

a. Pengertian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Nagari

Anggaran Pendapatan Belanja Nagari (APBNag), atau yang juga dikenal sebagai Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes), adalah kewajiban yang dimiliki oleh lembaga manajemen desa. APBNag berisi informasi tentang sumber penerimaan dan alokasi pengeluaran desa untuk satu tahun penuh. APBNag merupakan rencana keuangan tahunan yang disusun oleh kepala nagari bersama dengan Badan Permusyawaratan Nagari, yang kemudian ditetapkan melalui Peraturan Nagari. Tahun anggaran APBNag mencakup periode dari tanggal 1 Januari hingga 31 Desember.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) adalah rencana keuangan tahunan yang dibuat oleh pemerintah desa. APBDes terdiri atas:

1) Pendapatan Desa

Uang desa adalah dana yang berasal dari anggaran pemerintah, baik dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara maupun Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Pengalokasian dana ini harus dilakukan secara terkontrol dan sesuai aturan. Setiap penggunaan dana harus melewati tahapan yang jelas, dan seluruh laporan terkait penggunaan dana harus bersifat transparan serta dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

Penyelenggaraan pemerintahan desa melibatkan pengelolaan keuangan dan sumber pendapatan desa. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) menjadi pedoman dalam mengatur sumber pendapatan desa. Kepala Desa memiliki tanggung jawab penuh atas pengelolaan keuangan desa, yang diatur dalam Peraturan Desa terkait Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 mengatur secara khusus tentang pengelolaan keuangan desa. Pendapatan Desa merujuk pada seluruh dana yang diperoleh melalui rekening desa, yang merupakan hak desa selama satu tahun anggaran dan tidak perlu dikembalikan.

2) Belanja di Desa

Belanja Desa adalah seluruh pengeluaran dari rekening desa yang menjadi kewajiban desa selama satu tahun anggaran, yang tidak dapat dikembalikan. Anggaran desa ini digunakan untuk membiayai pelaksanaan kewenangan dan berbagai kebutuhan desa.

Menurut Sujaeweni Wiratna (2015), Anggaran Pendapatan Belanja Nagari (APBNag) merupakan laporan pertanggungjawaban dari pengelola manajemen nagari yang memberikan informasi terkait seluruh aktivitas dan kegiatan yang dilakukan di nagari, serta pelaksanaan rencana program yang dibiayai dengan dana desa. APBNag mencakup pendapatan, belanja, dan pembiayaan nagari.

Berdasarkan beberapa uraian definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa secara umum, Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APBNag) adalah rencana keuangan tahunan yang dibuat oleh Pemerintah Nagari bersama Badan Permusyawaratan Nagari, dan ditetapkan berdasarkan peraturan nagari. APBNag memungkinkan pemerintah nagari untuk mengelola sumber penerimaan dan mengalokasikan pengeluaran nagari sesuai dengan kebutuhan serta aturan yang berlaku di nagari. APBNag juga menjadi alat dalam perencanaan Pembangunan nagari, dimana

Kepala nagari bersama BPD menetapkan APBNag setiap tahun dengan peraturan nagari.

b. Tahap Penyusunan APBNag

Melibatkan beberapa tahapan dan mekanisme yang melibatkan partisipasi aktif dari berbagai pihak di tingkat nagari. Berikut adalah beberapa tahapan dan mekanisme yang umumnya dilakukan dalam penyusunan APBNag:

- 1) Tahap Persiapan
- 2) Tahap Evaluasi
- 3) Tahap Penetapan

c. Indikator Penyusunan APBNag

Menurut Fitri (2023) Adapun indicator dari penyusunan APBNag adalah:

- 1) Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APBNag) dilakukan secara mandiri.
- 2) Penyusunan APBNag memperhatikan potensi dan kebutuhan desa.
- 3) Perencanaan pembangunan nagari disusun melalui musyawarah desa.
- 4) Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) desa dilakukan secara partisipatif.
- 5) RPJM desa disusun dengan mengacu pada RPJM kabupaten.
- 6) RKP desa disusun sesuai dengan rencana kegiatan pemerintah daerah.

d. Pelaksanaan APBNag

Terdapat beberapa ketentuan yang wajib dipatuhi dalam pelaksanaan APBNag (Wijaya, 2018):

- 1) Semua penerimaan dan pengeluaran desa dilakukan melalui rekening kas desa.
- 2) Bagi desa yang belum memiliki layanan perbankan di daerahnya, pengaturannya ditetapkan oleh pemerintah kabupaten/kota.

- 3) Setiap penerimaan dan pengeluaran harus didukung dengan bukti yang sah.
- 4) Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan apapun selain yang telah ditetapkan dalam APBNag.
- 5) Bendahara dapat menyimpan uang dalam kas dengan jumlah tertentu untuk memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa sesuai dengan peraturan Bupati/Walikota.

e. Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBNag

Dalam pertanggungjawaban APBDes ada beberapa ketentuan yang perlu diperhatikan (Herlianto 2017):

- 1) Kepala desa wajib mempertanggungjawabkan realisasi pelaksanaan APBDes pada akhir tahun anggaran.
- 2) Laporan pertanggungjawaban harus mencakup unsur pendapatan, belanja, dan pembiayaan.
- 3) Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBNag ditetapkan dalam bentuk Peraturan Desa yang dilengkapi dengan dokumen-dokumen pendukung dengan:
 - a) Format laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes tahun anggaran.
 - b) Format laporan kekayaan milik desa per tanggal 31 Desember tahun anggaran.
 - c) Format laporan program pemerintah dan pemerintah daerah yang masuk ke desa.
 - d) Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes disampaikan secara tertulis kepada masyarakat melalui media informasi yang mudah diakses, seperti papan pengumuman, radio komunitas.
 - e) Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes disampaikan kepada Bupati melalui camat, dengan batas waktu maksimal 1 tahun setelah tahun anggaran berakhir.

f. Prinsip Pengelolaan APBNag

Umumnya, pengelolaan keuangan desa harus memiliki pedoman pada prinsip-prinsip sebagai berikut (Hanifah & Praptoyo, 2015):

- 1) Pengelolaan keuangan direncanakan secara terbuka melalui musyawarah perencanaan pembangunan desa, yang hasilnya dituangkan dalam peraturan desa tentang APBDes, serta dilaksanakan dan dievaluasi secara transparan dengan melibatkan semua elemen masyarakat desa.
- 2) Setiap kegiatan keuangan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis, dan hukum.
- 3) Informasi keuangan desa harus disampaikan secara transparan dan dapat diakses oleh masyarakat.
- 4) Pengelolaan keuangan desa dilaksanakan dengan prinsip hemat, terarah, dan terkendali.

Pelatihan dan pengembangan karyawan, pelatihan dan pengembangan karyawan yang baik dapat membantu meningkatkan kinerja pengelolaan APBNag. Pelatihan ini dapat membantu meningkatkan kualitas dan efektivitas karyawan yang terlibat dalam penyusunan APBNag.

B. Kajian Terdahulu

Ada beberapa penelitian yang relevan dengan permasalahan yang dikaji, diantaranya :

1. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ramadan (2015) dengan judul Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Pengelola Keuangan, Pengendalian Intern, Teknologi Informasi, dan Komitmen Organisasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Satker Kementerian Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Cipta Karya Provinsi Kepri, metode yang digunakan adalah penelitian deskriptif kuantitatif. Alat bantu statistik yang digunakan adalah SPSS, dengan uji validitas dan reliabilitas, serta regresi linier berganda. Penulis juga melakukan uji asumsi klasik, yang meliputi

uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi. Selain itu, penulis melakukan uji regresi serta pengujian hipotesis, yaitu uji t, uji F, dan koefisien determinasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia pengelola keuangan, pengendalian intern, teknologi informasi, dan komitmen organisasi berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pada Satker Kementerian Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Cipta Karya Provinsi Kepri. Semua faktor tersebut baik secara parsial maupun bersama-sama memengaruhi kualitas laporan keuangan di satker tersebut.

2. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Zuraida (2017) dengan judul Pengaruh Sistem Pengendalian Intern, Teknologi Informasi, Kualitas Sumber Daya Manusia, dan Komitmen Organisasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Satker di Lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Aceh Utara, populasi penelitian melibatkan seluruh satker di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Aceh Utara, yang berjumlah 53 satker. Jenis investigasi yang digunakan adalah studi kausalitas, dengan metode pengumpulan data secara cross-sectional. Unit analisis dalam penelitian ini adalah organisasi. Data primer diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada KPA dan penyusun laporan keuangan sebagai responden. Teknik analisis data yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah regresi linier berganda, yang digunakan untuk mengukur pengaruh antara dua atau lebih variabel, serta melihat pengaruhnya secara parsial maupun simultan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern, teknologi informasi, kualitas sumber daya manusia, dan komitmen organisasi secara bersama-sama berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pada satker di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Aceh Utara.
3. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Wiralestari (2020) dengan judul Pengaruh Kompetensi SDM, Partisipasi Penyusunan Anggaran, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Sistem Pengendalian

Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemda Kerinci, penelitian ini melibatkan Pegawai Negeri Sipil di 27 OPD Kabupaten Kerinci. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling, di mana peneliti mengambil 5 orang responden dari setiap OPD, sehingga jumlah sampel yang diperoleh sebanyak 135 PNS. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi berganda, dan pengujian hipotesis dilakukan melalui uji statistik t. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Secara bersama-sama, Kompetensi SDM, partisipasi penyusunan anggaran, pemanfaatan teknologi informasi, dan sistem pengendalian internal memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Kompetensi SDM tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Partisipasi penyusunan anggaran juga tidak menunjukkan pengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Sistem pengendalian internal Pemda Kerinci tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

4. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Satriawan (2020) dengan judul Pengaruh Pengendalian Intern, Kualitas Sumber Daya Manusia, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi pada Kualitas Laporan Keuangan dengan Komitmen Organisasi sebagai Pemoderasi, penelitian ini menggunakan indikator pengukuran seperti relevansi, keandalan, dapat dipahami, dan dapat dibandingkan. Responden yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 116 orang yang berasal dari 29 Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Buleleng, dengan kriteria tertentu terhadap responden. Teknik analisis data yang diterapkan adalah regresi linear berganda serta analisis regresi moderasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pengendalian intern dan kualitas SDM memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Pemanfaatan teknologi informasi tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Komitmen organisasi mampu memperkuat pengendalian intern, namun tidak mampu memperkuat hubungan antara

kualitas SDM dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan.

5. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Kaok (2021) dengan judul Pengaruh Komitmen Organisasi dan Kompetensi SDM Terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Kantor Distrik Kaptel Kabupaten Merauke. Metode yang digunakan adalah survei, wawancara, dan penyebaran kuesioner. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda dengan bantuan SPSS versi 22. Hasil uji t menunjukkan bahwa variabel X1 (Komitmen Organisasi) dan X2 (Kompetensi SDM) memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pada kantor Distrik Kaptel Kabupaten Merauke. Analisis hasil penelitian menunjukkan bahwa baik komitmen organisasi maupun kompetensi sumber daya manusia secara bersama-sama memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan di kantor tersebut.
6. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Teguh Erawati (2022) dengan judul Pengaruh Implementasi Aplikasi Sistem Keuangan Desa, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern, Dan Transparansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Desa (Studi Kasus Pada Desa Di Kecamatan Pakem Kabupaten Sleman). Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh penerapan penerapan sistem keuangan desa, kompetensi sumber daya manusia, sistem pengendalian internal, dan transparansi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah desa. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dengan menyebarkan kuesioner. Metode analisis data yang digunakan adalah uji kualitas data, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis. Hasil dalam penelitian ini menyatakan bahwa secara simultan penerapan penerapan sistem keuangan desa, kompetensi sumber daya manusia, sistem pengendalian intern, dan transparansi masing-masing berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah desa.

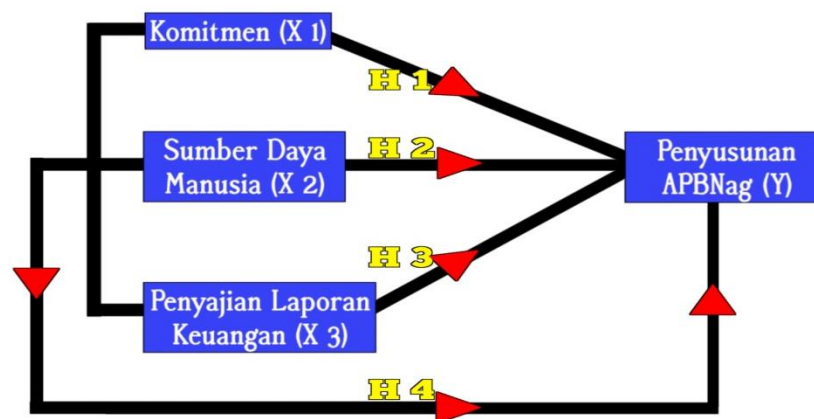
7. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Hasan (2023) dengan judul Analisis Pengaruh Sistem Pengendalian Internal dan Komitmen Organisasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Pemkab Gowa. Metode yang digunakan ialah metode kuantitatif. Pengumpulan datanya dengan menggunakan kuesioner yang diolah datanya menggunakan SPSS versi 25 dengan 30 responden perangkat di BAPPEDA Kab. Gowa. Analisis ini menggunakan analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian yang telah dilakukan yaitu variabel sistem pengendalian intern berpengaruh negatif namun signifikan terhadap kualitas laporan keuangan, variabel komitmen organisasi berpengaruh positif serta signifikan terhadap kualitas laporan keuangan, dan secara simultan variabel keduanya berpengaruh signifikan terhadap laporan keuangan.
8. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan (Fitri & Ariani, 2023) dengan judul Pengaruh Komitmen, Sumber Daya Manusia, dan Laporan Keuangan Terhadap Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Nagari (APBNag) Pada Tiga Nagari di Kabupaten Tanah Datar. Menggunakan metode Mixed Method dan proses pengambilan sampel memakai Teknik Purposive Sampling. Dimana populasi dari penelitian berasal dari Wali Nagari dan perangkat nagari. analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis linear berganda. Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa komitmen, sumber daya manusia dan pelaporan keuangan berpengaruh signifikan terhadap penyusunan APBNag.

C. Kerangka Teoritis

Kerangka berpikir adalah suatu gambaran tentang hubungan antara variabel independen dan variabel dependen dalam penelitian. Kerangka berpikir membantu peneliti dalam merumuskan hipotesis, memaparkan logika yang mendasari tema penelitian, serta memudahkan pembaca dalam memahami isi karya ilmiah yang ditulis.

Dalam penelitian ini terdapat tiga variable independent yaitu komitmen aparatur nagari, sdm dan penyusunan laporan keuangan.

Sedangkan variable dependennya ialah Penyusunan APBNag. Berikut Kerangka Berpikir penelitian ini:



Gambar 2. 1
Kerangka Berpikir

Sesuai kerangka berpikir di atas, dapat dijelaskan bahwa Komitmen memiliki pengaruh secara langsung terhadap penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Nagari (APBNag) (H1), lalu Sumber Daya Manusia memiliki pengaruh secara langsung terhadap penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Nagari (APBNag) (H2), kemudian untuk Penyajian Laporan Keuangan memiliki pengaruh secara langsung terhadap penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Nagari (APBNag) (H3). Dan untuk Komitmen, Sumber Daya Manusia Dan Penyajian Laporan Keuangan, setiap variabel memiliki pengaruh secara bersamaan sebab ketiga variabel termasuk kategori yang mempengaruhi penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Nagari (APBNag) (H4).

D. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap masalah yang masih bersifat praduga karena masih harus diuji kebenarannya. Berdasarkan kajian teoritis, penelitian yang relevan, dan kerangka berpikir di atas dapat ditarik hipotesis penelitian sebagai berikut :

- H0₁ : Komitmen tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penyusunan anggaran pendapatan dan belanja nagari (APBNag) pada tiga nagari di Kabupaten Tanah Datar.
- H1 : Komitmen memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penyusunan anggaran pendapatan dan belanja nagari (APBNag) pada tiga nagari di Kabupaten Tanah Datar.
- H0₂ : Sumber daya manusia tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penyusunan anggaran pendapatan dan belanja nagari (APBNag) pada tiga nagari di Kabupaten Tanah Datar.
- H2 : Sumber daya manusia memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penyusunan anggaran pendapatan dan belanja nagari (APBNag) pada tiga nagari di Kabupaten Tanah Datar.
- H0₃ : Penyajian laporan keuangan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penyusunan anggaran pendapatan dan belanja nagari (APBNag) pada tiga nagari di Kabupaten Tanah Datar.
- H3 : Penyajian laporan keuangan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penyusunan anggaran pendapatan dan belanja nagari (APBNag) pada tiga nagari di Kabupaten Tanah Datar.
- H0₄ : Komitmen, sumber daya manusia, dan penyajian laporan keuangan, secara bersama-sama tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penyusunan anggaran pendapatan dan belanja nagari (APBNag) pada tiga nagari di Kabupaten Tanah Datar.
- H4 : Komitmen, sumber daya manusia, dan penyajian laporan keuangan, secara bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penyusunan anggaran pendapatan dan belanja nagari (APBNag) pada tiga nagari di Kabupaten Tanah Datar.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan dengan menggunakan metode kuantitatif. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh data dan gambaran objektif mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APBNag) berdasarkan tiga faktor utama, yaitu komitmen, sumber daya manusia, dan pelaporan keuangan. Studi ini akan difokuskan pada tiga nagari yang berada di Kabupaten Tanah Datar.

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang peneliti gunakan ialah penelitian deskriptif kuantitatif yang bertujuan untuk menguji hipotesis yang berkaitan dengan subjek yang diteliti. Sedangkan untuk pendekatan penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif bertujuan untuk menguji keandalan teori yang digunakan lalu menghasilkan kesimpulan berupa angka dan statistik. Penelitian kuantitatif peneliti gunakan untuk meyakinkan fakta atau membuat prediksi terhadap teori yang dikeluarkan.

Metode penelitian adalah pendekatan yang terstruktur dari awal hingga akhir proses penelitian. Menurut Hardani (2020), penelitian kuantitatif merupakan penelitian ilmiah yang sistematis untuk memahami fenomena dan hubungannya. Beberapa definisi terkait metode penelitian kuantitatif, menyatakan bahwa metode ini merupakan pendekatan ilmiah yang melibatkan pembentukan ide dan gagasan secara terarah, menggunakan prinsip nomotetik, serta menerapkan pola berpikir deduktif.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Penelitian ini akan membahas Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APBNag) berdasarkan tiga prinsip utama, yaitu komitmen, sumber daya manusia, dan pelaporan keuangan. Data untuk penelitian ini akan diambil dari tiga nagari yang terletak di Kabupaten Tanah Datar, yaitu Nagari Padang Laweh, Nagari Pasie Laweh, dan Nagari Sungai Tarab.

2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 3. 1
Waktu penelitian

No	Aktivitas Penelitian	2023		2024							2025	
		April	Mei	Juni	Juli	Agus	Sept	Ock	Nov	Des	Jan	Feb
1	Observasi Awal											
2	Pengumpulan Data											
3	Bimbingan Proposal											
4	Seminar Proposal											
5	Revisi Setelah Seminar											
6	Penelitian											
7	Mengolah Hasil Penelitian											
8	Bimbingan Skripsi											
9	Munaqasah											

C. Populasi dan Sampel

Populasi merupakan suatu wilayah yang dimana terdapat objek atau subjek yang bakal mejadi bahan untuk peneliti melakukan penelitian sehingga peneliti dapat menarik kesimpulannya (Ulum Dan Juanda : 2016,79). Populasi pada penelitian ini yaitu pegawai pemerintah nagari pada tiga nagari dikabupaten Tanah Datar.

Sampel dapat diartikan sebagai anggota populasi yang dipilih dengan menggunakan prosedur tertentu, sehingga diharapkan dapat mewakili populasi. Teknik pengambilan sampel dengan Teknik Non *Probability* Sampling. Teknik Non *Probability* Sampling merupakan sebuah teknik pengambilan sampel yang tidak memberikan peluang atau kesempatan yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel (Sugiyono, 2018:82) Teknik yang digunakan yaitu Total Sampling. Total sampling adalah salah satu jenis pengambilan sampel dimana peneliti mengambil seluruh anggota populasi untuk dijadikan sampel (rai & Thapa 2015). Total Population Sampling digunakan apabila jumlah populasi cenderung kecil dan digunakan juga apabila peneliti menginginkan eror yang

sangat kecil. Hal ini bertujuan untuk meminimalisir kesalahan uji data dan memenuhi tujuan penelitian. Sampling jenuh ini peneliti gunakan karena jumlah populasi relatif kecil yaitu sebanyak 30 orang, yaitu minimalnya sampel dalam penelitian Kuantitatif dan juga penelitian membuat generalisasi dengan kesalahan sangat kecil.

D. Instrumen Penelitian

Dalam menyelesaikan penelitian ini, Teknik yang digunakan adalah analisis kuantitatif, yang mana analisis kuantitatif digunakan dengan cara menganalisis sebuah permasalahan yang diwujudkan dengan kuantitatif. Uji tersebut digunakan untuk mengetahui apakah instrument yang dirancang benar-benar akan memperoleh nilai yang baik, karena baik buruknya instrument ditunjukkan oleh tingkat validitas dan realibilitasnya. Sehingga dapat diketahui layak atau tidak layaknya. Jenis data dalam penelitian ini digunakan data kualitatif, dimana akan dianalisis dengan cara mengkuantitaifkan data-data penelitian ke dalam bentuk angka dengan menggunakan skala likert 5 poin (5-point likert scale).

Skala likert 5 poin dari 1 sampai 5 untuk menyatakan sangat tidak setuju, tidak setuju, cukup setuju, setuju dan Sangat Setuju. Dibagikan kepada 30 responden dan sumber datanya yaitu data primer yang langsung diambil dilapangan.

1. Variabel Komitmen

Tabel 3. 2
Variabel Komitmen

No	Parameter Komitmen	Alternatif Jawaban				
		STS	TS	CS	S	SS
1	Pemerintah Nagari memiliki petunjuk pelaksanaan anggaran dana Nagari yang bersumber dari Pemerintah pusat					
2	Pemerintah Nagari memiliki peraturan pelaksanaan anggaran dana Nagari yang					

	bersumber dari pemerintah pusat					
3	Pemerintah Nagari menggunakan dana Nagari yang diterima sejak pencairan dana Nagari					
4	Pemerintah Nagari menggunakan dana Nagari untuk pembangunan sarana dan prasarana Nagari					
5	Pemerintah Nagari menggunakan dana Nagari untuk pengembangan potensi ekonomi lokal					
6	Pemerintahan Nagari menggunakan dana Nagari untuk pemanfaatan sumber daya alam berkelanjutan					
7	Pemerintahan Nagari menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana Nagari secara tepat waktu					

Sumber : (Fitri, 2023)

2. Variabel Sumber Daya Manusia

Tabel 3. 3
Variabel Sumber Daya Manusia

No	Parameter Sumber Daya Manusia	Alternatif Jawaban				
		STS	TS	CS	S	SS
1	Pemerintah Nagari Memiliki struktur pemerintah Nagari yang jelas dan diisi oleh perangkat Nagari					
2	Aparatur Nagari mampu menyusun APBNag yang menjadi acuan penyaluran dana Nagari					
3	Aparatur Nagari mampu menyusun laporan realisasi dana Nagari dan sesuai dengan waktu yang ditetapkan					

4	Pemerintah Nagari mampu menyusun RPJM Nagari dan RKP Nagari					
5	Pemerintah Nagari menyiapkan informasi terkait pelaksanaan pembangunan Nagari bagi masyarakat melalui media informasi yang dimiliki Nagari					
6	Pemerintah Nagari mengikuti pembinaan tentang PP Nomor 60 tahun 2014					
7	Pemerintah Nagari mendapatkan pendampingan dana Nagari					

Sumber : (Fitri, 2023)

3. Variabel Laporan Keuangan

Tabel 3. 4
Variabel Laporan Keuangan

No	Parameter Laporan Keuangan	Alternatif Jawaban				
		STS	TS	CS	S	SS
1	Pengelolaan keuangan Nagari dilaksanakan sesuai dengan permandagri nomor 113 tahun 2014					
2	Penyusunan dan penyerahaan laporan keuangan Nagari dilakukan secara tepat waktu					
3	Dalam laporan keuangan Nagari tidak terdapat dana SILPA >30% yang merupakan suatu Nagariuatu indikasi penggunaan dana Nagari belum sepenuhnya dilaksanakan dengan baik					
4	Penyusunan laporan keuangan Nagari dilakukan dengan menggunakan					

	pendekatan akumtansi					
5	Laporan Keuangan Nagari dapat dapat diakses oleh masyarakat melalui media internet atau media informasi Nagari sebagai wujud transparansi keuangan Nagari					

Sumber : (Fitri, 2023)

4. Variabel Penyusunan APBNag

Tabel 3. 5
Variabel Penyusunan APBNag

No	Parameter Penyusunan APBNag	Alternatif Jawaban				
		STS	TS	CS	S	SS
1	Penyusunan APBNag Nagari dilaksanakan tanpa Pendamping / dilaksanakan secara mandiri					
2	Penyusunan APBNag Nagari dilaksanakan dengan memperhatikan potensi dan kebutuhan Nagari					
3	Perencanaan pembangunan Nagari disusun berdasarkan hasil kesepakatan dalam musyawarah Nagari					
4	Penyusunan RPJM Nagari dan RKP Nagari dilakukan dengan menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan Nagari secara Partisipatif					
5	RPJM Nagari disusun dengan mengacu pada RPJM Kabupaten					
6	RPJM Nagari disusun dengan informasi dari pemerintah daerah kabupaten yang berkaitan dengan pagu indikatif Nagari					

	dan rencana kegiatan pemerintah daerah provinsi maupun pemerintah kabupaten					
--	---	--	--	--	--	--

Sumber : (Fitri, 2023)

E. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah penyusunan anggaran pendapatan belanja nagari pada nagari sungai tarab, nagari padaang laweh, dan nagari pasie laweh :

1. Data Primer

Penelitian ini langsung kelapangan guna untuk mendapatkan data yang langsung dari nagari sungai tarab, nagari padaang laweh, dan nagari pasie laweh.

2. Data Sekunder

Dokumentasi dikantor wali nagari sungai tarab, kantor wali nagari padang laweh dan kantor wali nagari pasie laweh mengenai penyusunan anggaran pendapatan belanja nagari (APBNag), maupun jurnal yang terkait.

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini merupakan langkah paling strategis karena tujuan utama dalam penelitian ini yaitu mendapatkan data. Teknik dalam pengambilan data harus sesuai dengan metode agar sesuai dengan apa yang diharapkan sehingga penelitian dilakukan tidak sia – sia. Pengumpulan data yang dapat peneliti lakukan yakni:

1. Survei

Survei adalah proses pengumpulan data atau informasi yang dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang suatu populasi, kelompok, atau fenomena tertentu. Survei seringkali dilakukan dengan cara mengumpulkan data dari sejumlah responden atau sampel yang mewakili populasi yang lebih besar.

2. Penyebaran Kuesioner

Pengumpulan data dalam penelitian ini juga dengan cara menyebarkan kuesioner. Kuesioner adalah daftar pertanyaan yang harus

dijawab atau daftar isi yang harus diisi oleh responden. Kuesioner dibagikan langsung oleh peneliti kepada responden. Pengisian kuesioner dilakukan secara langsung oleh responden dengan memberikan tanda pada jawaban yang telah disediakan.

G. Teknik Validasi Instrumen Penelitian

1. Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk menentukan apakah suatu kuesioner sah atau valid. Sebuah kuesioner dianggap valid jika pertanyaan-pertanyaan di dalamnya mampu mengukur apa yang seharusnya diukur. Pengujian validitas dilakukan dengan menghitung korelasi bivariat antara skor setiap indikator dengan total skor konstruk. Adapun kriteria uji validitas adalah sebagai berikut:

- a. Jika r hitung bernilai positif dan r hitung $> r$ tabel, maka item pertanyaan tersebut dinyatakan valid.
- b. Jika r hitung bernilai negatif atau r hitung $< r$ tabel, maka item pertanyaan tersebut dianggap tidak valid.

2. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas bertujuan untuk menilai sejauh mana hasil pengukuran tetap konsisten ketika pengukuran dilakukan dua kali atau lebih pada fenomena yang sama dengan alat ukur yang sama. Pengujian reliabilitas biasanya menggunakan teknik *Cronbach's Alpha* untuk menentukan apakah suatu instrumen penelitian dapat diandalkan, terutama jika jawaban responden berbentuk skala. Instrumen penelitian dianggap reliabel dengan teknik ini jika nilai koefisien reliabilitasnya mencapai 0,60 atau lebih.

3. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik digunakan untuk mengevaluasi kelayakan suatu model dalam penelitian. Dalam penelitian ini, uji asumsi klasik yang diterapkan meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas.

a. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk memastikan bahwa dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Hal ini penting karena uji T dan uji F mengasumsikan bahwa residual mengikuti distribusi normal. Jika asumsi ini tidak terpenuhi, maka hasil uji statistik dapat menjadi tidak valid, terutama untuk sampel berukuran kecil.

b. Uji Multikolineritas

Uji multikolineritas bertujuan untuk mengidentifikasi apakah terdapat korelasi antar variabel bebas (independen) dalam model regresi. Model regresi yang ideal seharusnya tidak menunjukkan adanya korelasi antara variabel independen. Uji ini dapat dilakukan dengan menggunakan Variance Inflation Factor (VIF), di mana nilai VIF harus kurang dari 10, dan nilai toleransi tidak boleh kurang dari 0,1.

c. Uji Heterokedastisitas

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk mengevaluasi apakah kesalahan pengganggu dalam model regresi linear berganda memiliki varian yang sama dari satu pengamatan ke pengamatan lainnya. Uji ini bertujuan untuk mendeteksi apakah model regresi mengalami heteroskedastisitas, yaitu variasi varian dari residual antar pengamatan. Heteroskedastisitas dapat diidentifikasi melalui uji *Glejser*, yang melibatkan regresi antara nilai residual sebagai variabel dependen dengan variabel independen dalam model. Hasil regresi tersebut harus tidak signifikan untuk menyatakan bahwa model bebas dari heteroskedastisitas. Pada penelitian ini, uji *Glejser* menunjukkan bahwa variabel bebas tidak signifikan pada tingkat 5%, yang membuktikan bahwa model bebas dari heteroskedastisitas.

d. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam regresi linear ada korelasi antar kesalahan pengganggu (residual) pada periode t dengan kesalahan pada periode $t-1$ (sebelumnya). Jika terjadi korelasi,

maka dinamakan ada masalah autokorelasi. Uji Autokorelasi berkaitan dengan pengaruh observer atau data dalam satu variable yang saling berhubungan satu sama lain (Gani dan Amalia, 2015: 124). Besarnya nilai sebuah data dapat saja dipengaruhi atau berhubungan dengan data lainnya. Regresi secara klasik mensyaratkan bahwa variable tidak boleh tergejala autokorelasi. Jika terjadi autokorelasi, maka model regresi menjadi buruk karena akan menghasilkan parameter yang tidak logis dan diluar akal sehat.

4. Uji Linear Berganda

Data dalam penelitian ini dianalisis menggunakan analisis regresi linear berganda. Regresi linear berganda adalah metode yang digunakan untuk meramalkan nilai variabel terikat berdasarkan pengaruh dua variabel bebas atau lebih. Analisis ini bertujuan untuk membuktikan adanya hubungan fungsional atau kausal antara dua atau lebih variabel bebas (X_1 , X_2 , X_3) terhadap satu variabel terikat (Y). Model analisis linear berganda dalam pernyataan ini dinyatakan sebagai:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Keterangan:

Y = Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APBNag)

α = Konstanta

β_1 = Koefisienan regresi komitmen (X_1)

β_2 = Koefisienan regresi Sumber Daya Manusia (X_2)

β_3 = Koefisienan regresi Laporan Keuangan (X_3)

X_1 = Variabel Komitmen

X_2 = Variabel Sumber Daya Manusia

X_3 = Variabel Laporan Keuangan

e = Standar Error

5. Uji Koefisienan Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) pada dasarnya mengukur sejauh mana model mampu menjelaskan variasi pada variabel dependen. Nilai R^2 berkisar antara nol hingga satu. Nilai R^2 yang kecil menunjukkan bahwa

kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen sangat terbatas. Sebaliknya, nilai yang mendekati satu menunjukkan bahwa variabel independen memberikan hampir semua informasi yang diperlukan untuk memprediksi variasi variabel dependen. Secara umum, koefisien determinasi pada data silang (*crossection*) cenderung rendah karena adanya variasi yang besar antar pengamatan. Sementara itu, untuk data runtutan waktu (*time series*), biasanya nilai koefisien determinasinya lebih tinggi.

Nilai R digunakan untuk mengukur kekuatan hubungan antara variabel independen (X) secara simultan dengan variabel dependen (Y). Nilai korelasi dapat bersifat negatif atau positif, yang menunjukkan bentuk atau arah hubungan yang terjadi. Sementara itu, nilai R square (R^2) berguna untuk mengetahui seberapa besar kontribusi variabel independen secara bersama-sama dalam menjelaskan variabel dependen (Y).

6. Uji T (T-Test)

Uji statistik t digunakan untuk mengukur seberapa besar pengaruh satu variabel penjelas atau independen secara individu dalam menjelaskan variasi variabel dependen. Hipotesis nol (H_0) yang diuji adalah apakah suatu parameter (β_i) sama dengan nol, yang berarti variabel independen tidak signifikan sebagai penjelas terhadap variabel dependen. Hipotesis alternatifnya (H_a) menyatakan bahwa parameter suatu variabel tidak sama dengan nol, yang menunjukkan bahwa variabel independen memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Hipotesis alternatifnya (H_a) parameter suatu variabel tidak sama dengan nol, atau:

$$H_a : \beta_i \neq 0$$

Artinya, variabel tersebut merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel dependen. Cara melakukan uji t adalah sebagai berikut:

- a. Quick look dilakukan ketika jumlah derajat kebebasan (*degree of freedom*) adalah 20 atau lebih, dan dengan tingkat kepercayaan 5%. Hipotesis nol (H_0) yang menyatakan $\beta_i = 0$ dapat ditolak jika nilai t lebih besar dari 2 dalam nilai absolut. Artinya, kita menerima hipotesis

alternatif yang menyatakan bahwa variabel independen secara individu mempengaruhi variabel dependen.

- b. Membandingkan nilai statistik t hasil perhitungan dengan titik kritis dari tabel, yaitu jika nilai t hasil perhitungan lebih besar dibandingkan nilai t tabel, maka kita menerima hipotesis alternatif yang menyatakan bahwa variabel independen secara individu mempengaruhi variabel dependen.

Dalam pengujian ini dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Jika $t\text{-hitung} > t\text{-tabel}$ untuk $\alpha = 5\%$ H_0 diterima.
- b. Jika $t\text{-hitung} < t\text{-tabel}$ untuk $\alpha = 5\%$ H_0 ditolak.

7. Uji F (F test)

Uji statistik F digunakan untuk mengukur apakah semua variabel bebas yang dimasukkan dalam model memiliki pengaruh secara simultan terhadap variabel terikat atau dependen. Hipotesis nol (H_0) yang diuji adalah apakah semua parameter dalam model sama dengan nol, yang berarti variabel-variabel bebas tidak secara signifikan mempengaruhi variabel dependen secara bersamaan, atau:

$$H_0 : b_1 = b_2 = \dots = b_k = 0$$

Ini berarti bahwa variabel independen tidak secara signifikan menjelaskan variabel dependen. Hipotesis alternatif (H_a) menyatakan bahwa tidak semua parameter secara simultan sama dengan nol, yang menunjukkan bahwa setidaknya ada satu variabel independen yang memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen, atau:

$$H_a : b_1 \neq 0 \text{ atau } b_2 \neq 0 \text{ atau } \dots \text{ atau } b_k \neq 0$$

Artinya, semua variabel independen secara simultan memberikan penjelasan yang signifikan terhadap variabel dependen. Untuk menguji kedua hipotesis ini, digunakan uji statistik F dengan kriteria pengambilan keputusan yang membantu menentukan hasilnya, yakni sebagai berikut:

- a. Quick look dilakukan apabila nilai F lebih besar dari 4, di mana H_0 yang menyatakan $b_1 = b_2 = \dots = b_k = 0$ dapat ditolak pada tingkat kepercayaan 5%. Artinya, kita menerima hipotesis alternatif yang

menunjukkan bahwa setidaknya satu variabel independen secara simultan mempengaruhi variabel dependen.

b. Membandingkan nilai F hitung dengan F tabel, di mana jika F hitung lebih besar daripada F tabel, maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Dalam pengujian ini, ketentuan yang digunakan adalah sebagai berikut:

1) Jika $F_{hitung} > F_{tabel}$ untuk $\alpha = 5\%$, maka H_0 diterima.

2) Jika $F_{hitung} < F_{tabel}$ untuk $\alpha = 5\%$, maka H_0 ditolak.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Nagari

1. Nagari Sungai Tarab

a. Sejarah Nagari Sungai Tarab

Sungai Tarab, juga dikenal sebagai Sungai Tarok, adalah salah satu nagari yang sekaligus menjadi nama kecamatan di Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, Indonesia. Nagari ini berada di sekitar Batusangkar, yang merupakan ibu kota Kabupaten Tanah Datar.

Nama "Tarok" berasal dari jenis tumbuhan yang dulunya dimanfaatkan sebagai bahan serat untuk pakaian. Pada masa pendudukan Jepang, pakaian dari serat tumbuhan ini dikenal dengan istilah "baju goni sarawa tarok," yaitu baju berbahan serat rami untuk goni dan celana dari serat tarok.

Kecamatan Sungai Tarab dilintasi oleh dua jalan utama yang menghubungkan ibu kota Kabupaten Tanah Datar, yaitu Batusangkar, dengan Kota Payakumbuh dan Kota Bukittinggi. Wilayah ini terbentang mulai dari lereng Gunung Merapi hingga ke kaki Gunung Bungsu. Ke arah selatan dari Nagari Tigo Batua, terlihat Gunung Talang yang berada di Kabupaten Solok, sementara ke arah timur tampak Gunung Sago di Kabupaten Lima Puluh Kota. Dari sisi barat, berdiri megah Gunung Merapi, yang dianggap sebagai tanah asal nenek moyang masyarakat Minangkabau.

Dalam tambo, nagari ini dikenal sebagai tempat kedudukan salah satu dari Basa Ampek Balai (empat menteri utama), yakni yang bergelar Bandaro di Sungai Tarab. Selain itu, wilayah ini juga termasuk ke dalam Langgam Nan Tujuh, yaitu Pamuncak Koto Piliang.

Pada masa Kerajaan Minangkabau, Tuan Titah, salah satu anggota Basa Ampek Balai, memiliki kedudukan di Sungai Tarok. Keturunan atau pasukan Tuan Titah kemudian menyebar ke wilayah

Solok hingga Bayang, Pesisir Selatan. Silek Buah Tarok, sebuah seni bela diri yang dikenal di daerah Bayang, diyakini berasal dari silat yang diwariskan oleh keluarga Tuan Titah di Sungai Tarab pada masa lampau.

b. Geografis Nagari Sungai Tarab

Kecamatan Sungai Tarab terletak di kaki Gunung Merapi, di sebelah utara ibu kota Kabupaten Tanah Datar, yaitu Batusangkar. Wilayah ini berada pada ketinggian antara 450 hingga 715 meter di atas permukaan laut, dengan karakteristik geografis yang didominasi oleh daerah perbukitan dan kontur tanah yang bergelombang.

Kecamatan Sungai Tarab memiliki suhu berkisar antara 21-27 derajat Celsius, dengan curah hujan sekitar 450 mm per tahun dan tingkat kelembapan udara antara 60%-80%. Topografinya bergelombang dengan kemiringan lahan sebesar 10%-30%, menjadikan tanahnya cukup subur. Iklim yang mendukung ini menjadikan wilayah ini terkenal sebagai daerah yang unggul dalam hasil pertanian.

Secara geografis Nagari Sungai Tarab memiliki batas-batas:

- 1) Sebelah Utara dengan Nagari Pasia Laweh
- 2) Sebelah Selatan dengan Nagari Simpuruik
- 3) Sebelah Barat dengan Nagari Koto Tuo
- 4) Sebelah Timur dengan Nagari Sungayang

Nagari Sungai Tarab terhampar landai mengikuti lereng Gunung Merapi. Kondisi ini menciptakan peluang besar bagi perkembangan sektor pertanian. Sumber air dari lereng Gunung Merapi dengan mudah mengalir dan mengairi sawah-sawah milik penduduk. Oleh karena itu, sejak dahulu hingga kini, Sungai Tarab dikenal sebagai lumbung padi di Kabupaten Tanah Datar. Lokasinya berjarak sekitar 4 km ke arah utara dari Kota Batusangkar.

Sejalan dengan langkah pemerintah dalam memberdayakan nagari, dimana selanjutnya membagi nagari menjadi beberapa jorong, dan Nagari Sungai Tarab terbagi dalam empat jorong yaitu:

- 1) Jorong Koto Hiliang
- 2) Jorong Koto Panjang
- 3) Jorong Sungai Tarab
- 4) Jorong Tigo Batua

Dalam sistem pemerintahan nagari, wilayah nagari dibagi menjadi beberapa jorong. Jorong Koto Panjang dan Koto Hiliang memiliki struktur penghulu yang berbeda dari dua jorong lainnya, yaitu Jorong Sungai Tarab dan Tigo Batua. Jorong Sungai Tarab terdiri dari lima suku, sedangkan Jorong Tigo Batua terdiri dari tiga suku. Oleh karena itu, kedua wilayah ini sering disebut sebagai kawasan Salapan Batua.

c. Visi dan Misi

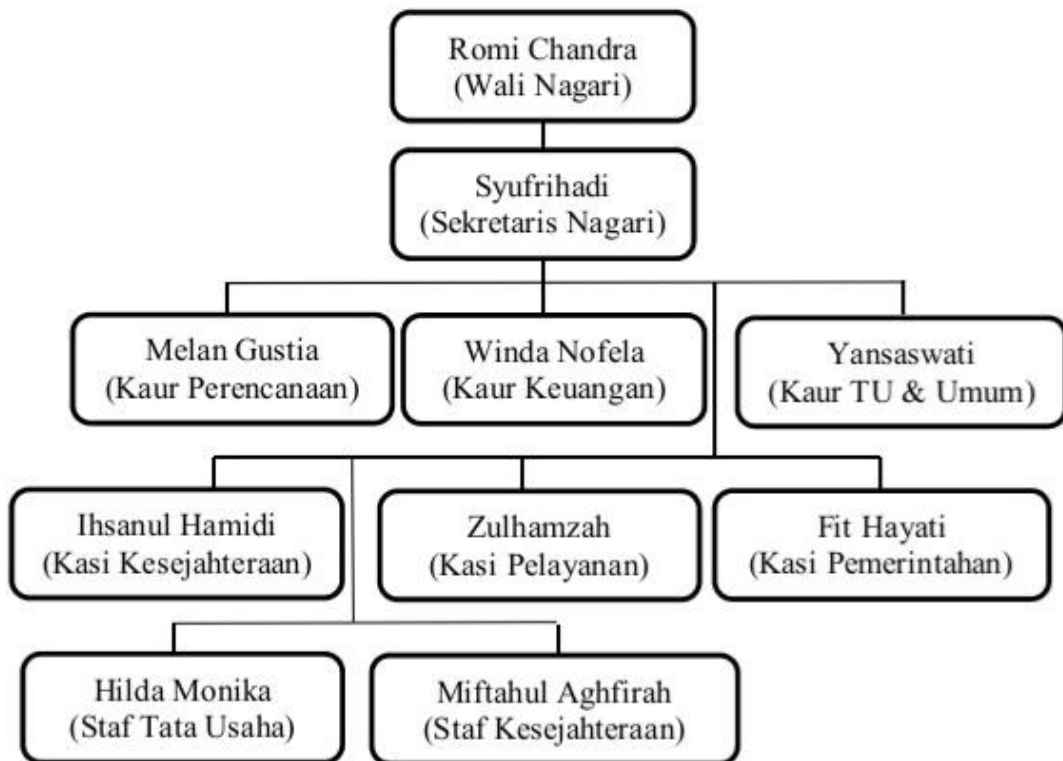
1) Visi

“Mewujudkan Desa Yang Mandiri, Maju, Sejahtera, Produktif, Agamais”

2) Misi

- a) Meningkatkan kualitas kesejahteraan warga masyarakat yang berdaya saing.
- b) Memberikan pemenuhan segala hak hak kebutuhan dasar warga masyarakat Desa.
- c) Pembangunan yang terarah dan terencana serta berkesinambungan.
- d) Meningkatkan aktifitas keagamaan, budaya, sosial kemasyarakatan serta mendorong kegiatan ekstra kurikuler kepemudaan.
- e) Menyelenggarakan pemerintahan yang bersih dan transparan serta bertanggung jawab.
- f) Merancang Website Portal Berita Desa agar pembangunan desa lebih transparan kepada masyarakat Desa maupun masyarakat luas.
- g) Pemenuhan gizi ibu dan anak.

d. Struktur Organisasi Nagari Sungai Tarab



Gambar 4. 1
Struktur Nagari Sungai Tarab

2. Nagari Padang Laweh

a. Sejarah Nagari Padang Laweh

Sejarah Nagari Padang Laweh berawal dari cerita nenek moyang pada masa lampau. Ketika para leluhur melakukan perjalanan untuk mencari lokasi pemukiman baru, mereka bergerak dari Nagari Pariangan menuju arah timur. Setelah menempuh perjalanan yang panjang, mereka berhenti untuk beristirahat di bawah sebuah pohon tarok. Pohon inilah yang menjadi tempat perhentian pertama para leluhur.

Setelah beristirahat di sana, sebagian dari mereka memutuskan untuk tinggal, sementara yang lain melanjutkan perjalanan ke arah barat. Perjalanan pun berlanjut hingga mereka berhenti di suatu tempat yang kemudian diberi nama Tampuniak, yang berarti tempat berkumpulnya Niniak. Setelah makan dan minum, mereka melanjutkan

perjalanan hingga mencapai lokasi yang lebih tinggi. Keesokan harinya, rombongan tersebut mengadakan musyawarah, dan sepakat untuk membagi anggota menjadi dua kelompok. Sebagian dari mereka merintis lahan padang yang luas, sementara kelompok lainnya menetap di daerah guguk nan tinggi, hingga akhirnya mereka membentuk wilayah masing-masing

Setelah berkembang, mereka akhirnya membentuk sebuah dusun. Seiring waktu, jumlah masyarakat di dusun tersebut semakin bertambah, sehingga dari dusun tersebut terbentuklah sebuah koto. Setelah koto terbentuk, mereka melangkah lebih jauh hingga akhirnya menjadikan koto tersebut sebuah nagari. Setelah nagari terbentuk, diadakanlah musyawarah untuk mencari nama bagi nagari tersebut. Dalam musyawarah tersebut, ada beberapa usulan dari anggota, yaitu pertama, nagari diberi nama Padang Luas, karena pada awal perintisan tampaklah padang yang sangat luas. Kedua, nagari diberi nama Guguk Padang yang Luas, karena setelah perintisan hingga sampai di Guguk yang Tinggi, mereka melihat hamparan yang luas.

Akhirnya, mereka yang hadir sepakat untuk mengadopsi kedua usulan tersebut, yaitu pertama Padang Luas, dan yang kedua Guguk Padang Luas. Ketika jumlah penduduk mulai bertambah dan masyarakat mulai mendapatkan pengetahuan, kata "Luas" pun diganti dengan "Lawas." Sejak saat itu, Nagari Padang Luas berubah menjadi Nagari Padang Lawas. Kemudian, dari kata "Padang Lawas," masyarakat setempat menggantinya dengan "Laweh," mengubah kata "Lawas" menjadi "Laweh." Jadi, Nagari Padang Lawas berubah menjadi Padang Laweh. Nama ini digunakan sebelum diberlakukannya Undang-Undang No. 5 Tahun 1979.

b. Geografi dan Demografi Nagari Padang Laweh

Geografi Nagari Padang Laweh berada di salah satu dari 10 nagari yang ada di Kecamatan Sungai Tarab, yang berdekatan dengan Gunung Marapi. Terletak pada koordinat 00°17' LS 100°19' BT, nagari

ini secara geografis terletak di dataran tinggi dengan ketinggian sekitar $\pm 650-700$ meter di atas permukaan laut. Nagari Padang Laweh mempunyai luas 1.275 Ha yang merupakan kawasan pertanian, perkebunan dan pemukiman yang terbagi ke dalam 4 Jorong yaitu :

- 1) Padang Laweh
- 2) Padang Laweh Baruah
- 3) Guguak Ateh
- 4) Guguak Baruah.

Secara garis besar batas-batas Nagari Padang Laweh secara administrasi adalah:

- 1) Sebelah Utara dengan Nagari Pasie Laweh
- 2) Sebelah Selatan dengan Nagari Gurun
- 3) Sebelah Timur dengan Nagari Sungai Tarab
- 4) Sebelah Barat dengan Nagari Talang Tengah

Topografi Nagari Padang Laweh berbukit-bukit dan bergelombang, dengan iklim yang termasuk dalam kategori subtropis, serta memiliki kawasan hutan. Sebagian besar lahan di Nagari Padang Laweh digunakan untuk permukiman, pertanian, dan perkebunan. Jika dilihat dari penggunaannya, lahan di wilayah ini lebih dominan digunakan untuk sektor pertanian, seperti sawah dan perkebunan.

Nagari Padang Laweh sebagian besar dimanfaatkan untuk perkebunan, pertanian, dan kawasan hutan. Perkebunan sendiri mencakup lebih dari 50% dari total luas nagari. Hutan memiliki luas sekitar 21%, sawah 16%, pemukiman 8%, kolam 0,20%, lapangan olahraga 0,20%, jalan raya 0,12%, dan pemandian 0,08%.

Pada tahun 2016, berdasarkan data dari Wali Nagari Padang Laweh, jumlah penduduk tercatat sebanyak 3.449 jiwa, yang terdiri dari laki-laki dan perempuan. Jorong dengan jumlah penduduk terbanyak adalah Jorong Padang Laweh, dengan total penduduk sebanyak 1.293 jiwa. Sementara jorong dengan jumlah penduduk paling sedikit adalah Jorong Guguak Baruah, yang hanya memiliki 513 jiwa. Berdasarkan

data tersebut, jumlah penduduk perempuan lebih banyak dibandingkan laki-laki, yaitu sebanyak 1.933 jiwa, sedangkan laki-laki sebanyak 1.516 jiwa.

Pendidikan merupakan salah satu faktor yang sangat memengaruhi perkembangan suatu bangsa, khususnya di sebuah nagari. Kemajuan dan pertumbuhan suatu nagari tidak dapat dipisahkan dari kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan. Sejarah telah menunjukkan bahwa pendidikan berperan kunci dalam memajukan suatu bangsa, pembangunan sumber daya manusia, serta peningkatan kualitas hidup yang strategis untuk menghadapi tantangan di era globalisasi. Persaingan di berbagai bidang kehidupan semakin ketat, sehingga dibutuhkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang sehat, cerdas, dan tangguh. Masyarakat Nagari Padang Laweh menyadari pentingnya pendidikan, karena melalui belajar, mereka bisa memperoleh ilmu yang bermanfaat. Ini terlihat dari adanya berbagai jenjang pendidikan, mulai dari sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SLTP), hingga sekolah menengah atas (SLTA) bagi anak usia wajib belajar (7-15 tahun).

Dalam upaya memenuhi kebutuhan masyarakat nagari, berbagai fasilitas umum seperti sarana pendidikan, sarana kesehatan, dan fasilitas lainnya telah disediakan. Namun, fasilitas tersebut belum sepenuhnya memadai dan terkelola dengan baik akibat keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) dan Sumber Daya Alam (SDA) yang dimiliki.

Nagari Padang Laweh memiliki berbagai hasil tanaman pertanian yang beragam. Setiap jorong di Nagari Padang Laweh mengembangkan tanaman seperti padi, bawang daun, bawang merah, buncis, cabe, terong, dan tomat. Sementara itu, tanaman umbi-umbian seperti ubi kayu, ubi jalar, kedelai, kacang tanah, dan talas hanya terdapat di Jorong Padang Laweh, Padang Laweh Baruh, dan Guguak Baruah.

c. Visi dan Misi

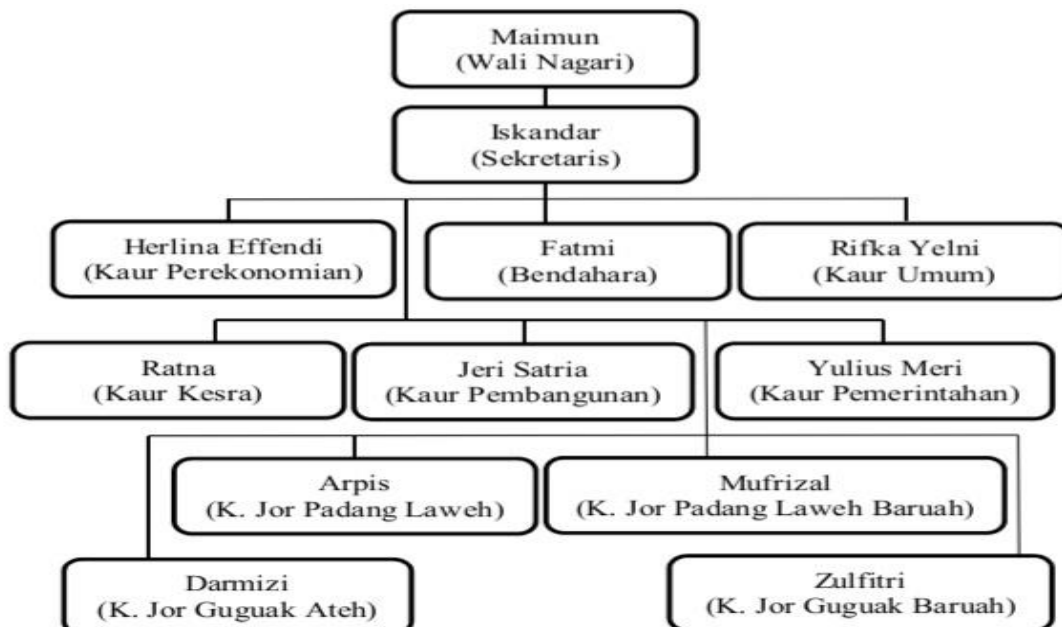
1) Visi

“Mewujudkan Desa Yang Mandiri, Maju, Sejahtera, Produktif, Agamais”

2) Misi

- a) Meningkatkan kualitas kesejahteraan warga masyarakat yang berdaya saing.
- b) Memberikan pemenuhan segala hak hak kebutuhan dasar warga masyarakat Desa.
- c) Pembangunan yang terarah dan terencana serta berkesinambungan.
- d) Meningkatkan aktifitas keagamaan, budaya, sosial kemasyarakatan serta mendorong kegiatan ekstra kurikuler kepemudaan.
- e) Menyelenggarakan pemerintahan yang bersih dan transparan serta bertanggung jawab.

d. Struktur Organisasi Nagari Padang Laweh



Gambar 4. 2
Struktur Nagari Padang Laweh

3. Nagari Pasie Laweh

a. Sejarah Nagari Pasie Laweh

Pasie Laweh adalah salah satu nagari yang berada di kecamatan Sungai Tarab, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, Indonesia. Nagari ini terletak dekat dengan Batusangkar, yang merupakan ibu kota dari Kabupaten Tanah Datar.

Nagari Pasie Laweh (Pasla) adalah sebuah nagari yang indah, terletak di kaki dan lereng Gunung Merapi, salah satu gunung tertinggi di Provinsi Sumatera Barat. Udara di daerah ini sejuk, pemandangannya memukau, dan penduduknya hidup sesuai dengan falsafah "Adat basandi Syara', Syara' basandi kitabullah." Artinya, selain menjunjung tinggi adat istiadat yang telah diwariskan turun temurun, penduduk juga teguh berpegang pada Al Qur'an sebagai panduan hidup. Oleh karena itu, nuansa budaya Minangkabau sangat terasa di nagari ini.

Nagari yang kini sedang memasuki masa penyaringan calon wali nagari terdiri dari lima jorong, yaitu Jorong Babussalam, Jorong Lurah Ampang, Jorong Ekor Koto, Jorong Tanjuang Lado Ateh Bukik, dan Jorong Talang Dasun. Setiap jorong dipimpin oleh seorang wali jorong. Pusat pemerintahan nagari terletak di Jorong Babussalam, yang juga dikenal sebagai "Pintu Keselamatan," di mana kantor wali nagari berada. Sebagian besar penduduk di nagari ini bekerja sebagai petani dan guru. Dahulu, nagari ini sangat terkenal, baik dari segi pertanian sebagai penghasil pisang berkualitas tinggi yang bahkan dikenal hingga ke Jambi dan Riau, maupun sebagai daerah penghasil "pahlawan tanpa tanda jasa" tertinggi di kecamatan Sungai Tarab.

Sarana transportasi di Nagari Pasie Laweh sudah cukup memadai. Jalan-jalan antar jorong telah diaspal dengan kualitas yang cukup baik, sehingga masyarakat dapat dengan mudah mengakses jorong lainnya. Dengan infrastruktur yang baik, hasil bumi dapat diangkut lebih cepat dan efektif, baik menuju pasar Batusangkar maupun ke daerah lainnya.

Di nagari ini, tersedia sarana pendidikan yang cukup lengkap, mulai dari Taman Kanak-kanak, SD, SMP, hingga SMA. Penduduk di nagari ini sangat memperhatikan pendidikan, melebihi bidang lainnya. Di tengah-tengah nagari, terdapat sebuah pasar yang sebelumnya sempat hilang akibat banjir bandang "Galodo," yaitu pasar "Balai Selasa." Meskipun belum sepenuhnya berfungsi seperti semula karena baru selesai dibangun, pasar ini dapat mengakomodir kebutuhan masyarakat, baik untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari maupun untuk penyaluran hasil kekayaan alam dari sektor pertanian. Nagari ini juga dikenal sebagai penghasil tanaman pangan seperti padi dan jagung, tomat, cabe keriting, serta tanaman keras seperti kayu manis, dan lainnya.

Selain sarana pendidikan formal, di nagari ini juga tersedia fasilitas pendidikan informal seperti TPA/TPSA yang dikelola oleh setiap pemerintahan jorong. Setiap jorong memiliki surau, yang menjadi tempat bagi anak-anak untuk menuntut ilmu agama dan belajar membaca Al Qur'an. Diharapkan ke depannya, generasi muda di nagari ini tidak hanya unggul dalam pendidikan formal, tetapi juga dalam ilmu agama. Dengan demikian, saat mereka merantau, mereka tetap menjaga unsur-unsur agama yang tak boleh mereka tinggalkan. Hal ini diharapkan dapat menjaga mereka dari terlibat dalam hal-hal negatif seperti penyalahgunaan narkoba, seks bebas, dan lainnya. Itulah harapan yang dimiliki setiap orang tua di nagari ini, agar anak-anak mereka tumbuh menjadi cerdas sekaligus alim ulama. Dengan begitu, nama "Pasie Laweh" akan terus harum, karena prestasi yang diraih oleh anak-anak nagari ini, di mana pun mereka berada. Sehingga, meskipun seseorang belum pernah mengunjungi nagari ini, nama Pasie Laweh tetap dikenal di berbagai tempat.

b. Geografi dan Demografi Nagari Pasie Laweh

Nagari Pasie Laweh terletak di Kecamatan Sungai Tarab, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat. Luas nagari ini

mencapai 13,75 kilometer persegi, yang merupakan sekitar 19,14 persen dari total luas wilayah Kecamatan Sungai Tarab. Nagari Pasie Laweh berjarak sekitar 3 kilometer dari ibu kota kecamatan Sungai Tarab dan sekitar 8 kilometer dari ibu kota kabupaten, Batusangkar. Pada tahun 2017, nagari ini memiliki penduduk sebanyak 2.604 jiwa, yang terdiri dari 1.281 laki-laki dan 1.323 perempuan, serta terdapat 664 rumah tangga di daerah ini.

Nagari Pasie Laweh terdiri dari 4 jorong, yakni:

- 1) Babussalam
- 2) Tanjuang Lado Ateh Bukik
- 3) Lurah Ampang
- 4) Talang Dusun

Jorong Babussalam memiliki luas 3,39 kilometer persegi dan dihuni oleh 855 jiwa. Jorong Tanjuang Lado Ateh Bukik, dengan luas 3,45 kilometer persegi, memiliki 318 jiwa penduduk. Jorong Lurah Ampang, seluas 4,66 kilometer persegi, dihuni oleh 863 jiwa. Sedangkan Jorong Talang Dusun, dengan luas 2,25 kilometer persegi, memiliki 568 jiwa penduduk.

Fasilitas Pendidikan:

- 1) SDN 03 Sungai Tarab
- 2) SDN 16 Sungai Tarab
- 3) SDN 25 Sungai Tarab
- 4) SMPN 2 Sungai Tarab
- 5) SMAN 2 Sungai Tarab

Fasilitas kesehatan: Puskesmas Pembantu

c. Visi dan Misi

- 1) Visi

“Membangun Nagari Pasie Laweh Yang Memiliki Budaya Dan Masyarakat Sejahtera Di Bawah Kendali Iman Dan Taqwa, Terwujudnya Adat Basandi Syara’-Syara’ Basandi Kitabullah”

2) Misi

- a) Membuka akses komunikasi dan informasi online 24 jam melalui handpone dengan nomor kartu resmi pemerintah nagari, agar berfungsi memberi dan menerima, berita dan pesan dari masyarakat sekretariat nagari untuk masyarakat yang berdomisili dalam kenagarian pasie laweh.
- b) Menyelenggarakan pemerintahan nagari yang transparan, memperoleh informasi yang dibutuhkan dan bebas menyampaikan pendapat dan saran ke pemerintahan nagari
- c) Menjaga dan meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana nagari seperti, jalan, balai lapangan olahraga, masjid, mushala, surau serta sarana listrik dan air bersih di nagari
- d) Menjaga fasilitas umum nagari seperti jalan, balai, lapangan olahraga, masjid, mushalla, surau tetapi layak dipergunakan masyarakat dan melakukan perbaikan
- e) Secara rutin melakukan kegiatan yang melibatkan seluruh elemen masyarakat seperti gotong royong, kegiatan olahraga, kegiatan PKK, kegiatan majelis ta'lim dan pengajian, penyuluhan kesehatan, penyuluhan pertanian dan lain-lain.
- f) Bekerjasama dengan sekolah-sekolah maupun TPA/TPSA pengajian, untuk bisa mendidik generasi muda sehingga menghasilkan generasi muda berakhlak beriman dan bertaqwa, serta pengetahuan ilmu dan berguna.
- g) Bekerjasama dengan segala unsur yang ada dalam nagari maupun memanfaatkan potensi perantau, Bertitik tolak dari Visi dan Misi diatas maka Pemerintahan Nagari Pasie Laweh fokus pada pembangunan yang di arahkan kepada: Pembangunan Agama dan Budaya, Pembangunan hukum dan Pemerintahan, Pembangunan ekonomi, Pembangunan Sumber daya Alam dan lingkungan Pembangunan sumber daya manusia, Pembangunan sarana dan prasarana.

d. Struktur Organisasi Nagari Pasie Laweh



Gambar 4. 3
Struktur Nagari Pasie Laweh

B. Profil Responden

Sampel dalam penelitian ini terdiri dari semua pegawai di kantor wali nagari Kabupaten Tanah Datar yang terlibat dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja nagari. Pegawai yang menjadi partisipan dalam penelitian ini meliputi setiap individu yang menjalankan tugas di bidang pengembangan nagari.

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui penyebaran kuesioner secara langsung, di mana peneliti mendatangi langsung para responden yang bekerja di Kantor Wali Nagari di tiga kenagarian Kabupaten Tanah Datar. Total kuesioner yang disebar sebanyak 32 lembar. Sampel yang dijadikan penelitian mencakup tiga Kantor Wali Nagari dari keseluruhan yang ada di Kabupaten Tanah Datar. Jumlah kuesioner yang dikembalikan sama dengan yang disebar, yakni sebanyak 30 kuesioner.

Kuesioner yang dikembalikan dalam penelitian ini diterima dalam keadaan rapi dan sudah terisi sesuai dengan petunjuk teknis yang telah disediakan. Penyebaran kuesioner dilakukan sesuai dengan waktu yang telah

disepakati bersama pihak Kantor Wali Nagari. Selain itu, peneliti juga turut mendampingi responden saat mengisi kuesioner, sehingga hasil akhir penyebaran data dapat sesuai dengan kebutuhan penelitian, serta kuesioner yang tidak dapat diolah akibat kesalahan bisa dihindari.

Tabel 4. 1
Data Sampel Penelitian

Keterangan	jumlah	persentase
Kuesioner yang dibagikan	30	100 %
Kuesioner yang tidak kembali/cacat	0	0
Total kuesioner yang kembali	30	100%

Sumber : Data Primer Diolah, 2023

Berdasarkan Tabel 4.1 dapat disimpulkan bahwa jumlah sampel yang digunakan peneliti berjumlah 30 responden di perangkat tiga nagari Kabupaten Tanah Datar yaitu Nagari Sungai Tarab, Nagari Padang Laweh, dan Nagari Pasie Laweh. Peneliti juga memperoleh kembali kuesioner dalam jumlah yang sama yaitu sebesar 100% sedangkan kuesioner yang tidak kembali atau cacat sebesar 0%.

C. Hasil Penelitian

Dalam penyusunan APBNag, terdapat beberapa faktor yang memengaruhinya, antara lain komitmen, sumber daya manusia, dan laporan keuangan. Komitmen yang kuat dari semua pihak yang terlibat dalam penyusunan APBNag sangat penting untuk memastikan bahwa anggaran disusun secara akurat dan efisien. Selain itu, sumber daya manusia yang berkualitas dengan pengetahuan yang memadai tentang proses penyusunan APBNag juga sangat dibutuhkan. Tidak kalah pentingnya, laporan keuangan yang efektif dan terstruktur dengan baik dapat membantu memperlancar proses penyusunan APBNag.

Tanah Datar adalah sebuah kabupaten yang terletak di Provinsi Sumatra Barat, dengan luas wilayah mencapai 133.600 hektar dan jumlah penduduk sekitar 374.431 jiwa pada tahun 2021. Kabupaten ini terdiri dari

395 jorong, yang tersebar di 75 nagari, dalam 14 kecamatan. Kuesioner yang dibagikan dalam penelitian ini mencakup tiga nagari, yaitu Nagari Sungai Tarab, Nagari Padang Laweh, dan Nagari Pasie Laweh, dengan total 30 kuesioner yang disebar. Dari jumlah tersebut, seluruhnya telah dikembalikan, dan data yang terkumpul dapat diolah menggunakan SPSS versi 22.

1. Uji Validitas

Pengujian validitas data bertujuan untuk menentukan apakah sebuah kuesioner yang disebarkan memenuhi kriteria validitas. Proses ini dilakukan dengan menggunakan Pearson Correlation, di mana suatu item dinyatakan valid jika nilai r hitung $\geq r$ tabel, yang berarti item tersebut memiliki korelasi signifikan dengan skor total. Sebaliknya, jika r hitung $\leq r$ tabel, maka item tersebut dianggap tidak memiliki korelasi signifikan. Dalam kasus ini, nilai r tabel untuk data kuesioner dihitung berdasarkan $df = n - 2$, yaitu $30 - 2 = 28$, sehingga diperoleh r tabel atau standar validitas sebesar 0,361.

Tabel berikut menyajikan hasil pengujian validitas untuk empat variabel yang digunakan dalam penelitian ini. Variabel tersebut meliputi Komitmen (X1), Sumber Daya Manusia (X2), Laporan Keuangan (X3), dan Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APBNag) (Y), dengan total responden sebanyak 30 orang.

a. Variabel Komitmen (X1)

Tabel 4. 2
Uji validas
Variabel Komitmen (X1)

Variabel	Item Pernyataan	Standar Validitas	Person Corelation	Keterangan
Komitmen (X1)	X1	0,361	0,646	Valid
	X2	0,361	0,578	Valid
	X3	0,361	0,695	Valid
	X4	0,361	0,543	Valid
	X5	0,361	0,575	Valid
	X6	0,361	0,709	Valid
	X7	0,361	0,480	Valid

Sumber: diolah menggunakan SPSS 22

Berdasarkan uji validitas yang dilakukan, hasil analisis pada variabel komitmen menunjukkan bahwa terdapat 7 butir pertanyaan yang dinyatakan valid. Hal ini dapat dijelaskan karena nilai Person Correlation lebih dari 0,361, sehingga variabel Komitmen (X1) dapat dikatakan valid.

b. Variable Sumber Daya Manusia (X2)

Tabel 4. 3
Uji validas
Variable Sumber Daya Manusia (X2)

Variabel	Item Pernyataan	Standar Vadilitas	Person Corelation	Keterangan
Sumber Daya Manusia (X2)	X1	0,361	0,692	Valid
	X2	0,361	0,491	Valid
	X3	0,361	0,578	Valid
	X4	0,361	0,713	Valid
	X5	0,361	0,517	Valid
	X6	0,361	0,719	Valid
	X7	0,361	0,654	Valid

Sumber: diolah menggunakan SPSS 22

Berdasarkan uji validitas di atas, analisis variabel Sumber Daya Manusia menunjukkan bahwa terdapat 7 butir pertanyaan yang dinyatakan valid. Hal ini dapat dijelaskan karena nilai Person Correlation lebih dari 0,361, sehingga variabel Sumber Daya Manusia (X2) dapat dikatakan valid.

c. Variabel Laporan Keuangan (X3)

Tabel 4. 4
Uji Validitas
Variabel Laporan Keuangan (X3)

Variabel	Item Pernyataan	Standar Vadilitas	Person Corelation	Keterangan
Penyusunan Laporan Keuangan (X3)	X1	0,361	0,801	Valid
	X2	0,361	0,753	Valid
	X3	0,361	0,417	Valid
	X4	0,361	0,644	Valid
	X5	0,361	0,689	Valid

Sumber: diolah menggunakan SPSS 22

Berdasarkan uji validitas di atas, hasil analisis variabel Laporan Keuangan menunjukkan bahwa terdapat 5 butir pertanyaan yang dinyatakan valid. Hal ini dikarenakan nilai Person Correlation lebih dari 0,361, sehingga variabel Penyusunan Laporan Keuangan (X3) dapat dikatakan valid.

d. Variabel Penyusunan APBNag (Y)

Tabel 4. 5
Uji Validitas
Variabel Penyusunan APBNag (Y)

Variabel	Item Pernyataan	Standar Validitas	Person Corelation	Keterangan
Penyusunan APBNag (Y)	Y1	0,361	0,433	Valid
	Y2	0,361	0,857	Valid
	Y3	0,361	0,852	Valid
	Y4	0,361	0,716	Valid
	Y5	0,361	0,772	Valid
	Y6	0,361	0,802	Valid

Sumber: diolah menggunakan SPSS 22

Berdasarkan uji validitas di atas, hasil analisis variabel Penyusunan APBNag menunjukkan bahwa terdapat 6 butir pertanyaan yang dinyatakan valid. Hal ini dapat dijelaskan karena nilai Person Correlation lebih dari 0,361, sehingga variabel Penyusunan APBNag (Y) dapat dikatakan valid.

2. Uji Reliabilitas

Uji Reliabilitas adalah alat yang digunakan untuk mengukur keandalan kuesioner sebagai indeks dari suatu variabel. Kuesioner dikatakan reliabel atau dapat dipercaya jika jawaban responden terhadap pertanyaan-pertanyaan tersebut konsisten dari waktu ke waktu. Reliabilitas kuesioner atau indikator dapat dilihat dari nilai cronbach' alpha yang lebih besar dari 0,60. Jika nilai cronbach' alpha lebih dari 0,60, maka kuesioner atau indikator tersebut dapat dianggap reliabel. Hasil uji reliabilitas secara keseluruhan dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 4. 6
Hasil Uji Reliabilitas

Reliability Statistics			
Variabel	Cronbach's Alpha	Standar Reliabilitas	Keterangan
Komitmen	0,709	0,60	Reliabel
Sumber Daya Manusia	0,740	0,60	Reliabel
Penyajian Laporan Keuangan	0,673	0,60	Reliabel
Penyusunan Apbnag	0,776	0,60	Reliabel

Sumber: diolah menggunakan SPSS 22

Berdasarkan tabel di atas, nilai cronbach's alpha untuk seluruh variabel dalam penelitian menunjukkan angka lebih besar dari 0,60 atau mendekati 1. Komitmen (X1) memiliki nilai 0,709, Sumber Daya Manusia (X2) sebesar 0,740, Penyajian Laporan Keuangan (X3) sebesar 0,673, dan Penyusunan APBNag (Y) sebesar 0,776. Oleh karena itu, penelitian ini dapat dikatakan andal dan reliabel.

3. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

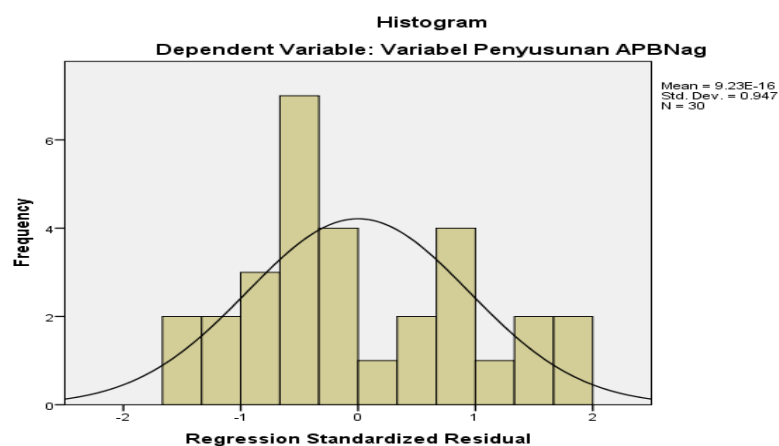
Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah data penelitian memiliki distribusi normal atau tidak (Sugiyono, 2021). Dalam penelitian ini, uji normalitas yang digunakan adalah melalui grafik histogram. Model regresi yang baik adalah model yang memiliki distribusi normal, atau setidaknya mendekati normal. . Kurva penyebaran P-plot dan one sample kolmogrov-smirnav test yang dapat dilihat pada gambar berikut:

Tabel 4. 7
Hasil Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		30
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	2.12177817
Most Extreme Differences	Absolute	.142
	Positive	.142
	Negative	-.098
Test Statistic		.142
Asymp. Sig. (2-tailed)		.126c
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		

Sumber: diolah menggunakan SPSS 22

Berdasarkan tabel tersebut, hasil uji normalitas menunjukkan nilai kolmogrov-smirnov test dengan signifikansi sebesar 0,126. Ini menandakan bahwa data dapat dikatakan normal karena $0,126 > 0,05$.



Gambar 4. 4
Gambar Histogram

Sumber: diolah menggunakan SPSS 22

Dari gambar 4.1 histogram diatas memperlihatkan bahwa jika grafik histogram menggambarkan pola distribusi yang cukup normal dimana data tidak keluar dari batasnya yaitu kanan maupun kiri.



Gambar 4. 5
Uji P-Plot

Sumber: diolah menggunakan SPSS 22

Namun, pada gambar P-Plot terlihat bahwa penyebaran data berada di sekitar garis diagonal dan terus mengikuti garis tersebut, sehingga dapat disimpulkan bahwa pola distribusi yang terjadi pada gambar di atas adalah normal.

b. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah setiap variabel independen dalam model regresi linear berganda saling berkorelasi tinggi atau tidak. Uji ini menggunakan nilai tolerance value dan VIF (Variance Inflation Factor). Jika nilai VIF kurang dari 10 dan nilai tolerance lebih dari 0,1, maka model dapat dikatakan bebas dari multikolinearitas. Berikut ini adalah hasil uji multikolinearitas dalam penelitian ini:

Tabel 4. 8
Hasil Uji Multikolinearita
Coefficients

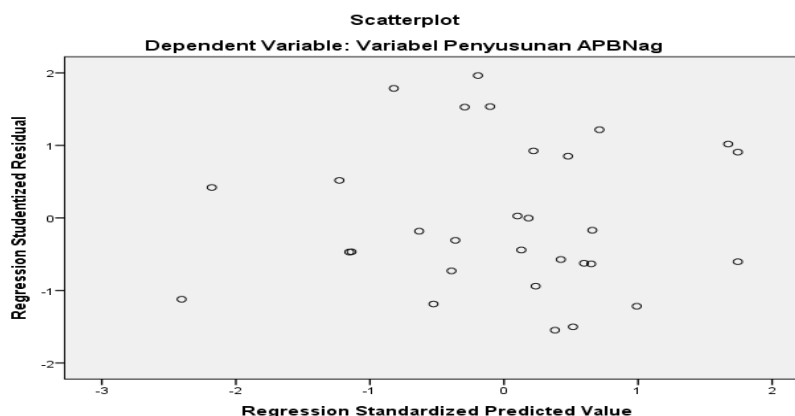
Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
Komitmen	0.838	1.193
Sumber Daya Manusia	0.531	1.884
Laporan Keuangan	0.603	1.659

Sumber: diolah menggunakan SPSS 22

Berdasarkan tabel di atas, nilai tolerance dan VIF dari masing-masing variabel independen dapat diketahui. Variabel Komitmen Aparatur Nagari memiliki nilai tolerance 0,838 dan VIF 1,193. Variabel Sumber Daya Manusia memiliki nilai tolerance 0,531 dan VIF 1,884. Variabel Laporan Keuangan memiliki nilai tolerance 0,603 dan VIF 1,659. Semua nilai tolerance lebih dari 0,1, dan nilai VIF kurang dari 10. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala multikolinearitas antara variabel independen dalam penelitian ini.

c. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk mengevaluasi apakah varians data dalam penelitian bersifat konstan (homokedastis) atau tidak (heteroskedastis). Dalam regresi, heteroskedastisitas muncul jika titik-titik data membentuk pola tertentu, baik secara teratur maupun tidak teratur. Pola ini bisa berupa gelombang yang melebar atau menyempit.



Gambar 4. 6
Uji Heteroskedastisitas

Sumber: diolah menggunakan SPSS 22

Berdasarkan hasil scatter plot, terlihat bahwa titik penyebarannya tidak membentuk pola yang jelas dan tidak menunjukkan pola yang teratur. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa pada variabel Komitmen (X1), Sumber Daya Manusia (X2), dan Penyusunan Laporan Keuangan (X3) tidak terjadi heteroskedastisitas.

d. Uji Autokorelasi

Tabel 4. 9
Hasil Uji Autokorelasi

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.339 ^a	.115	.013	2.24085	1.979
a. Predictors: (Constant), PLK, Komitmen, SDM					
b. Dependent Variable: APBNag					

Berdasarkan hasil uji Autokorelasi di atas, dapat dilihat bahwa nilai Durbin-Watson (d) yakni sebesar 1.979. Dilihat dari nilai tabel Durbin-Watson pada signifikansi 5% dimana ditemukan nilai dL sebesar 1.214 dan dU sebesar 1.650. Nilai Durbin-Watson 1,979 lebih besar dari batas atas (dU) yakni 1,650. Maka sebagaimana dasar pengambilan keputusan dalam uji Durin-watson diatas, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat masalah atau gejala autokorelasi.

4. Analisis Regresi Linear Berganda

Uji regresi linear berganda menggunakan bantuan SPSS 22 dapat digunakan untuk mengukur pengaruh antara beberapa variabel independen, yaitu Komitmen Aparatur Nagari, Sumber Daya Manusia, dan Penyusunan Laporan Keuangan terhadap satu variabel dependen, yaitu APBNag. Berikut adalah hasil analisisnya dalam penelitian ini:

Tabel 4. 10
Analisis Regresi Linear Berganda
Coefficients

	Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	18.533	5.560		3.334	0.042
	Komitmen	0.113	0.197	0.108	2.577	0.037
	SDM	0.330	0.175	0.336	3.891	0.041
	LPK	0.244	0.234	0.193	2.042	0.032
a. Dependent Variable: APBNag						

Sumber: diolah menggunakan SPSS 22

Sesuai tabel Hasil Uji Regresi Linear Berganda bisa diperhatikan jika model dari regresi linear bergandanya dalam penelitian ini adalah :

$$Y = 18.533 + 0,113 X_1 + 0,330 X_2 + 0,244 X_3$$

Berdasarkan model regresi linear berganda yang terbentuk, maka dapat diinterpretasikan hasil sebagai berikut:

Nilai konstanta (a), artinya jika variabel independen seperti Komitmen, Sumber Daya Manusia, Dan Laporan Keuangan bernilai konstan atau nol maka nilai variabel independen penyusunan APBNag akan meningkat sebesar 18.533. Koefisien komitmen bernilai 0,113, artinya setiap variabel komitmen meningkat, dengan asumsi variabel independen lainnya dianggap konstan, maka penyusunan APBNag akan meningkat sebesar 0,113. Koefisien sumber daya manusia bernilai 0,330, artinya setiap variabel sumber daya manusia meningkat, dengan asumsi variabel independen lainnya dianggap konstan, maka penyusunan APBNag akan meningkat sebesar 0,330. Koefisien laporan keuangan bernilai 0,244, artinya setiap variabel laporan keuangan meningkat, dengan asumsi variabel independen lainnya dianggap konstan, maka penyusunan APBNag akan meningkat sebesar 0,244.

5. Koefisien determinasi (R²)

Uji koefisien determinasi dilakukan dalam penelitian untuk mengukur sejauh mana hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Nilai koefisien determinasi (R²) berada dalam rentang

antara nol hingga satu. Jika nilai R^2 kecil, itu menunjukkan bahwa kemampuan variable independen dalam menjelaskan variasi variable dependen sangat terbatas. Sementara itu, nilai R^2 yang mendekati satu menunjukkan bahwa variable independen memberikan hampir semua informasi yang diperlukan untuk memprediksi variasi pada variable dependen. Berikut adalah hasil dari uji determinasi dalam penelitian ini:

Tabel 4. 11
Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)
Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.839a	.615	.513	2.741
a. Predictors: (Constant), LPK, Komitmen, SDM				

Sumber: diolah menggunakan SPSS 22

Berdasarkan tabel di atas, nilai R square sebesar 0,615 atau 61,5%. Artinya, variable independen yaitu komitmen, sumber daya manusia, dan penyusunan laporan keuangan mampu mempengaruhi variable dependen sebesar 61,5%. Sementara sisanya, yaitu 38,5%, dipengaruhi oleh faktor lain di luar dari variable independen yang diteliti.

6. Uji T (T-Test)

Tabel 4. 12
Hasil Uji t

	Model	t	Sig.
1	(Constant)	3.334	0.042
	Komitmen	2.577	0.037
	SDM	3.891	0.041
	LPK	2.042	0.032
a. Dependent Variable: APBNag			

Berdasarkan hasil uji t di atas, dapat dilihat bahwa nilai signifikan untuk Komitmen Aparatur Nagari (X_1) terhadap Penyusunan APBNag (Y) adalah $0,037 < 0,05$, dengan nilai t hitung sebesar 2,577 yang lebih besar daripada t table 2,052. Oleh karena itu H_1 diterima, dan H_{01} ditolak yang

berarti terdapatnya pengaruh yang signifikan dari Komitmen (X1) terhadap penyusunan APBNag (Y).

Berdasarkan hasil uji t di atas, terlihat bahwa nilai signifikan untuk Sumber Daya Manusia (X2) terhadap Penyusunan APBNag (Y) adalah $0,041 < 0,05$, dengan nilai t hitung sebesar 3,891 yang lebih besar daripada t table 2,052. Oleh karena itu H_{02} ditolak, dan H_2 diterima yang menunjukkan bahwa Sumber Daya Manusia (X2) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penyusunan APBNag (Y).

Berdasarkan hasil uji t di atas, terlihat bahwa nilai signifikan untuk Laporan Keuangan (X3) terhadap Penyusunan APBNag (Y) adalah $0,032 > 0,05$, dengan nilai t hitung sebesar 2,042 yang lebih kecil daripada t table 2,052. Oleh karena itu H_{33} ditolak, H_{03} diterima yang menunjukkan bahwa Penyajian Laporan Keuangan (X3) tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penyusunan APBNag (Y).

7. Uji F (F-Test)

Uji F digunakan untuk menguji apakah semua variabel independent dalam model penelitian memiliki pengaruh secara simultan terhadap variabel dependen. Uji ini membantu peneliti mengetahui apakah set variabel independent secara bersama-sama memberikan dampak yang signifikan terhadap variabel dependen. Berikut hasil uji f yang diperoleh:

Tabel 4. 13
Hasil Uji F

ANOVAa						
	Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	16.910	3	5.637	4.123	0.000b
	Residual	130.556	26	5.021		
	Total	147.467	29			
a. Dependent Variable: APBNag						
b. Predictors: (Constant), LPK, Komitmen, SDM						

Sumber: diolah menggunakan SPSS 22

Berdasarkan tabel di atas, nilai Fhitung sebesar 4.123. Berdasarkan keputusan pengujian dengan tingkat signifikan 5% atau 0,05, karena nilai signifikan lebih kecil dari 0,05, maka H1 diterima. Hal ini menunjukkan bahwa Komitmen Aparatur Nagari, Sumber Daya Manusia, dan Penyusunan Laporan Keuangan secara simultan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Penyusunan APBNag.

D. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Pengaruh Komitmen Aparatur Nagari Terhadap Penyusunan APBNag

Hasil uji t menunjukkan bahwa Komitmen memiliki pengaruh positif terhadap penyusunan APBNag. Hal ini terlihat dari nilai t hitung untuk variabel Komitmen (X1) sebesar 2,577, dengan nilai signifikan 0,037. Artinya, semakin tinggi komitmen aparatur nagari dari ketiga Nagari tersebut, maka semakin baik pula kualitas penyusunan APBNag yang dihasilkan dari Nagari tersebut.

Hasil yang tidak menunjukkan pengaruh positif tersebut terjadi karena Komitmen merupakan suatu sikap yang harus dimiliki oleh setiap individu dalam sebuah organisasi. Dengan adanya komitmen, suatu organisasi dapat berjalan dengan baik. Sebaliknya, jika komitmen lemah, kinerja organisasi bisa terganggu. Komitmen berasal dari dalam diri individu, yang mencerminkan keyakinan dan niat seseorang dalam menjalankan tugasnya. Komitmen yang kuat dari Aparatur Nagari dapat memotivasi dan mendorong seluruh elemen dalam proses penyusunan APBNag.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Zuraida (2017), yang menyatakan bahwa keterlibatan, dukungan, dan komitmen dari setiap pengelola keuangan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam penyusunan laporan keuangan. Komitmen yang konsisten dan kesadaran akan pentingnya patuh terhadap organisasi merupakan faktor kunci dalam menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Oleh

karena itu, dalam penyusunan APBNag, dibutuhkan komitmen yang kuat dari aparaturnagari untuk meningkatkan kinerja dalam proses penyusunan APBNag secara efektif.

2. Pengaruh Sumber Daya Manusia terhadap Penyusunan APBNag

Hasil uji t pengaruh Sumber Daya Manusia terhadap Penyusunan APBNag menunjukkan bahwa Sumber Daya Manusia tidak memiliki pengaruh positif terhadap penyusunan APBNag. Berdasarkan hasil uji yang menunjukkan nilai t hitung untuk variabel Sumber Daya Manusia (X_2) sebesar 3,891 dengan nilai signifikan 0,041, dapat disimpulkan bahwa Sumber Daya Manusia memiliki kontribusi yang signifikan terhadap proses penyusunan APBNag. Kehadiran Sumber Daya Manusia yang berkualitas, terampil, dan berpengalaman di bidang penyusunan APBNag memberikan dampak yang positif dan menghasilkan hasil yang terpercaya di ketiga nagari tersebut.

Hasil yang positif ini terjadi karena Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan elemen kunci dalam setiap organisasi, terutama dalam sistem pemerintahan. SDM menjadi faktor utama dalam menggerakkan berbagai program yang dirancang oleh Pemerintah Nagari. Tanpa adanya SDM yang memadai, pelaksanaan dan pencapaian tujuan pemerintahan akan sulit tercapai. Kesiapan SDM di suatu daerah menjadi faktor penting dalam pengambilan keputusan, yang dapat dilihat dari kemampuan dan keahlian yang dimiliki. Dengan keahlian yang sesuai dengan profesinya, SDM yang handal dan kompeten dapat memberikan kontribusi signifikan dalam penyusunan APBNag, sehingga hasilnya menjadi lebih efektif dan berkualitas.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian (Kaok, 2021), yang menyatakan bahwa semakin baik kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM), maka akan sangat berkontribusi positif dalam penyusunan laporan keuangan. Kompetensi SDM yang tinggi terbukti dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan, karena dengan adanya keahlian dan pengetahuan yang memadai, laporan keuangan yang dihasilkan menjadi

lebih akurat dan dapat dipercaya. Untuk memastikan laporan keuangan yang berkualitas, kompetensi SDM perlu terus ditingkatkan, sehingga mampu memberikan hasil yang sesuai dengan kebutuhan tingkat daerah kabupaten. Oleh karena itu, dalam penyusunan APBNag, diperlukan SDM yang ahli dan berpengalaman di bidangnya guna meningkatkan kualitas SDM dalam penyusunan APBNag.

3. Pengaruh Laporan Keuangan terhadap Penyusunan APBNag

Hasil uji t pengaruh Penyajian Laporan Keuangan terhadap Penyusunan APBNag menunjukkan bahwa laporan keuangan tidak memiliki dampak positif terhadap proses penyusunan APBNag. Berdasarkan hasil uji t, t hitung untuk variabel Penyusunan Laporan Keuangan (X3) sebesar 0,032 dengan nilai signifikan 2,042, yang menunjukkan bahwa laporan keuangan tidak berpengaruh signifikan terhadap penyusunan APBNag. Dengan adanya laporan keuangan yang tepat dan terstruktur dengan baik, maka akan memudahkan aparaturnagari dalam menyusun APBNag yang lebih akurat dan berkualitas.

Hasil yang menunjukkan pengaruh positif tersebut disebabkan karena penyusunan laporan keuangan merupakan salah satu indikator penting dalam menilai kesehatan suatu pemerintahan nagari, sekaligus sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam pengelolaan dana yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada desa/nagari. Oleh karena itu, penyusunan laporan keuangan harus dilakukan sesuai dengan standar yang berlaku, dan perlu didukung oleh tenaga ahli yang memiliki keahlian di bidangnya.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian dari Wiralestari (2020), yang menyatakan bahwa kualitas laporan keuangan hanya dapat tercapai apabila memiliki sistem pengendalian internal yang baik, didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas, komitmen organisasi yang kuat, serta memanfaatkan teknologi informasi secara optimal dalam proses penyusunan laporan keuangan. Dengan adanya informasi yang berkualitas, diharapkan laporan keuangan pemerintah dapat

berperan secara prediktif dan prospektif. Prediktif berarti laporan keuangan dapat memberikan informasi yang berguna untuk memprediksi kebutuhan dan hasil sumber daya untuk operasi yang berkelanjutan, serta besarnya risiko dan ketidakpastian yang mungkin terjadi. Sedangkan prospektif berarti laporan keuangan dapat menyajikan informasi yang sesuai dengan anggaran dan ketentuan yang berlaku, serta kepatuhan terhadap batas penggunaan anggaran yang telah ditetapkan dalam APBN/APBD. Oleh sebab itu, dalam penyusunan laporan keuangan, pemerintah nagari harus memiliki pemahaman yang baik untuk menghindari kesalahan dalam pencatatan, sehingga laporan keuangan dapat disusun dengan benar berdasarkan pencatatan yang handal dan akuntabel.

4. Pengaruh Komitmen Aparatur Nagari, Sumber Daya Manusia, dan Penyusunan Laporan Keuangan terhadap Penyusunan APBNag

Berdasarkan hasil uji F yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa nilai signifikan untuk pengaruh Komitmen Aparatur Nagari (X1), Sumber Daya Manusia (X2), dan Penyajian Laporan Keuangan (X3) terhadap Penyusunan APBNag (Y) adalah $0,000 < 0,05$, dengan F hitung sebesar 4.123 yang lebih besar dibandingkan F tabel 2,052. Hal ini membuktikan bahwa H_{a4} diterima. Artinya, terdapat pengaruh yang signifikan antara Komitmen Aparatur Nagari (X1), Sumber Daya Manusia (X2), dan Penyajian Laporan Keuangan (X3) terhadap Penyusunan APBNag (Y).

Hasil berpengaruh positif tersebut disebabkan oleh tingkat komitmen yang kuat di setiap nagari. Tidak hanya komitmen, tetapi Sumber Daya Manusia (SDM) juga memainkan peran penting dalam suatu nagari. SDM yang memiliki keahlian sesuai dengan bidangnya akan menciptakan sumber daya yang berkualitas dan menjadi penggerak utama dalam sebuah nagari. Selain itu, penyusunan Laporan Keuangan yang dikelola oleh SDM yang berkualitas dan ahli di bidangnya dapat

menghasilkan laporan keuangan yang akurat serta sesuai dengan standar yang berlaku

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ramadan (2015), yang menyatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia dalam pengelolaan keuangan, pengendalian intern, penggunaan teknologi informasi, serta komitmen organisasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa komitmen, sumber daya manusia, dan pelaporan keuangan memiliki pengaruh signifikan terhadap penyusunan APBNag. Oleh sebab itu, komitmen yang kuat, sumber daya manusia yang berkualitas, serta pelaporan keuangan yang akurat sangat diperlukan dalam proses penyusunan APBNag di tiga Nagari Kabupaten Tanah Datar.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, penelitian ini menghasilkan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaruh Komitmen terhadap Penyusunan APBNag
Hasil uji t, pengaruh menunjukkan bahwa Komitmen Aparatur Nagari memiliki dampak yang signifikan terhadap penyusunan APBNag. Hal ini terlihat dari nilai t hitung sebesar 2,577 dengan nilai signifikan 0,037. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Komitmen berpengaruh secara nyata terhadap penyusunan APBNag.
2. Pengaruh Sumber Daya Manusia terhadap Penyusunan APBNag
Hasil uji t, pengaruh menunjukkan bahwa Sumber Daya Manusia tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap penyusunan APBNag. Hal ini terlihat dari nilai t hitung sebesar 3,891 dengan nilai signifikan 0,041. Maka dapat disimpulkan bahwa Sumber Daya Manusia berpengaruh terhadap penyusunan APBNag.
3. Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan terhadap Penyusunan APBNag
Hasil uji t, pengaruh menunjukkan bahwa Penyusunan Laporan Keuangan tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap penyusunan APBNag. Hal ini terlihat dari nilai t hitung sebesar 2,042 dengan nilai signifikan 0,032. Maka dapat disimpulkan bahwa Penyajian Laporan Keuangan tidak berpengaruh terhadap penyusunan APBNag.
4. Pengaruh Komitmen Aparatur Nagari, Sumber Daya Manusia, dan Penyajian Laporan Keuangan terhadap Penyusunan APBNag
Hasil Uji F menunjukkan bahwa Komitmen Aparatur Nagari (X1), Sumber Daya Manusia (X2), dan Penyajian Laporan Keuangan (X3) secara simultan memiliki pengaruh signifikan terhadap penyusunan APBNag. Hal ini terlihat dari nilai signifikan $0,000 < 0,05$ dan F hitung sebesar 4.123,

yang lebih besar dari F tabel 2,052. Maka dapat disimpulkan bahwa H_{a4} diterima, yang berarti terdapat hubungan yang signifikan antara ketiga variabel tersebut terhadap Penyusunan APBNag.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dan adanya beberapa keterbatasan dalam penelitian ini, maka peneliti memberikan beberapa saran, yaitu:

1. Bagi penulis adalah agar bisa menambah wawasan dan pengetahuan yang lebih tentang akuntansi khususnya di bidang akuntansi publik.
2. Untuk peneliti selanjutnya diharapkan untuk mengembangkan dan menyempurnakan penelitian lebih lanjut di masa yang akan datang. Dan melengkapi metode survey untuk meningkatkan sikap kepedulian dan keseriusan responden dalam menjawab pertanyaan yang ada. Serta dapat menambah variabel-variabel lainnya yang berpengaruh terhadap penyusunan APBNag, menambah teori-teori lainnya dan peraturan pemerintah yang terbaru yang berkaitan dengan Penyusunan APBNag.
3. Bagi sektor public seperti pemimpin dan pegawai yang bekerja di kantor wali nagari 3 nagari di kabupaten tanah datar supaya lebih meningkatkan komitmen yang tinggi, dan laporan keuangan yang transparan, supaya proses penyusunan APBNag dapat berjalan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Apriana, S., Said, D., & Nurleni. (2020). *The Influence of Organizational Commitment, Competence of Village Fund Management Officers, and Utilization of Information Technology on Accountability of Village Financial Management*. *AFEBI Accounting Review*, 4(02), 94. <https://doi.org/10.47312/aar.v4i02.291>
- Armstrong, M. (2006). *A Handbook Of Human Resource Management Practice* (Tenth edit). Koganpage.
- Arifin, M. Z. (2018). Pengelolaan Anggaran Pembangunan Desa Di Desa Bungin Tinggi, Kecamatan Sirah Pulau Padang, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan. *Jurnal Thengkyang*, [Http://Jurnaltengkiang. Ac. Id/Jurnal/Index. Php/Jurnaltengkiang/Issue/View/1/Halaman](http://Jurnaltengkiang.Ac.Id/Jurnal/Index.Php/Jurnaltengkiang/Issue/View/1/Halaman), 20(20), 1-21
- Davici, N. (2018). Pengaruh Tekanan Eksternal, Komitmen Pimpinan Dan Faktor Politik Terhadap Transparansi Laporan Keuangan. *Jurnal Akuntansi*, 6(1), 1– 20.
- Dewi, E. S. (2020). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Pemanfaatan Teknologi Informasi, komitmen Organisasi, Transparansi Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa. Universitas Widya Dharma
- Eryana. (2018). Keterbatasan Sumber Daya Manusia Terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa. 89-95.
- Fitri, S. A., & Nur, R. A. (2023). Pengaruh Komitmen Sdm Nagari Dan Laporan Keuangan Terhadap Apbnag. *Ilmiah Raflesia Akuntansi*, 9(2), 29–39.
- Gamayuni, R. R. (2018). Penerapan Akuntansi Basis Akrua di Sektor Publik : Kualitas Pelaporan Keuangan. Pusaka Media.
- Hanifah, S. I., & Praptoyo, S. (2015). Akuntabilitas Dan Transparansi Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes). *Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi*, 4(8), 1–15.
- Hardani, Andriani, H., Auliya, N. H., Fardani, R A., Ustiawaty, J., Utami, E. F., Sukmana, D. J., & Istiqomah, R. R. (2020). *Buku Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif* (Issue March).
- Hariyanti, Tjahjadi, B., & Soewarno, N. (2019). *The mediating effect of intellectual capital , management accounting information systems ,*

internal process performance , and customer performance. International Journal of Productivity and Performance Management, 68(7), 1250–1271.
<https://doi.org/10.1108/IJPPM-02-2018-0049>

Idrus, A. (2022). Komitmen (Kajian Empiris Kesungguhan, Kesepakatan, Iklim Organisasi dan Kepuasan Kerja).

Imelia, D., Rahayu, S., & Wiralestari, W. (2021). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Partisipasi Penyusunan Anggaran, Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemda Kerinci. *Jaku (Jurnal Akuntansi & Keuangan Unja) (E-Journal)*, 6(3), 149-163.

Kaok, Maria. (2021). Analisis Komitmen Organisasi Dan Kompetensi SDM Terhadap Kualitas Laporan Keuangan, Forum Ekonomi Vol. 23 No.4.

Khaeruman, S. . M. . C., Dr. Luis Marnisah, M. . Ciq., Dr. Drs. Syech Idrus., M. S., Laila Irawati, S. M. C. C., Dr. Ir. Hj. Yuany Farradia, Ms., Eni Erwantiningsih, S. . M., Hartatik, S. S. . M. S., Supatmin, S. . M., Yuliana, S. . M., Dr. Hj. Nur Aisyah, S. M., Nurdin Natan, S. P. . M., Mutinda Teguh Widayanto, S. . M., & Ismawati, S. . M. (2021). Meningkatkan Kinerja Sumber Daya Manusia Konsep & Studi Kasus. In Bookchapter.

Lubis, J., & Jaya, I. (2019). Komitmen Membangun Pendidikan. In CV. Rasi Terbit. <https://books.google.co.id/books?id=c630DwAAQBAJ>

Maksyur, V. M. (2015). Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Komitmen Organisasi, Sistem Pengendalian Intern, Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Empiris Pada Skpd Kabupaten Indragiri Hulu). Faculty Of Economics Riau University, Pekanbaru, Indonesia.

Merlina, M. (2022). Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi, Partisipasi Penganggaran Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Dengan Profesionalisme SDM Sebagai Variabel Pemoderasi. Universitas Widya Dharma.

Mutiana Liza, Yossi Diantimala Dan Zuraida. (2017). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern, Teknologi Informasi, Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Komitmen Organisasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan.

Pearce, Jhon Dan Richard B. Robinson. (2014). Manajemen Strategis Formulasi. Kediri: Salamba Empat.

Peraturan Daerah Provinsi Sumatra Barat Nomor 07 Tahun 2018 Tentang Nagari

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa.

Priyono. (2008). Metode Penelitian Kuantitatif. Sidoarjo: Zifatama Publishing.

Rai, N., Dan Thapa, B. (2015). A Study On Purposive Sampling Method In Research. Kathmandu: Kathmandu School Of Law.

Ramadan, Sahrul. (2015). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Pengelola Keuangan, Pengendalian Intern, Teknologi Informasi Dan Komitmen Organisasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Satker Kementerian Pekerjaan Umum Direktorat Jendral Cipta Karya Provinsi Kepri., Skripsi Sarjana Ekonomi Dari Universitas Maritim

Rulyanti, D., Sularso, R. A., & Sayekti, Y. (2017). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Pemerintah Desa Melalui Pengelolaan Keuangan Desa Sebagai Variabel Intervening. *Bisnis Dan Manajemen*, 11(3), 323–335.

Satriawan, G. M. I., & Dewi, G. A. K. R. S. (2020). Komitmen Organisasi Memoderasi Pengaruh Pengendalian Intern, Kualitas Sumber Daya Manusia, Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Pada Kualitas Laporan Keuangan *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika*, 10(2), 255-266

Sugiyono. (2009). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. (2021). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D (Cetakan ke). Alfabeta.

Sujarweni, V Wiratna. (2015). Akuntansi Desa Panduan Tata Kelola Keuangan Desa. Yogyakarta, Penerbit Pusat Baru Press.

Ulum, Ihyaul Dan Ahmad Juanda. (2016). Metodologi Penelitian Akuntansi. Klinik Skripsi. Malang: Aditya Media Publishing.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, 460 (2014). <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38685/uu-no-23-tahun2014>

Wibowo, A. (2020). Manajemen Sumber Daya Manusia (W. Susanto (ed.)). Yayasan Prima Agus Teknik.

Wijaya, K. (2022). Jurnal Ekonomi dan Bisnis Analisa Pengelolaan Apbdes Dalam Meningkatkan. Jurnal Ekonomi Dan Bisnis, 2, 76– 90.

Zubaidi, N., Cahyono, D., & Maharani, A. (2019). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan. International Journal of Social Science and Business., 3(2), 68–76. <https://doi.org/10.37641/jiakes.v8i2.372>